

LAPORAN AKHIR

PENELITIAN KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI (PEKERTI)



**Redesain Sistem dan Program Siaran Berjaringan TV local
Sebagai Basis Penguatan Media Performance TV local
dan Pengembangan Industri Kreatif di Daerah
(Studi pada TV local & Jaringan Jawa Timur)
Tahun ke 2 (Dua) dari rencana 2 (Dua) Tahun**

Ketua

Surokim, S.Sos, M.Si NIDN 0022067404

Anggota

Muhtar Wahyudi, S.Sos, MA NIDN 0006127207

Mitra Peneliti

DR. Catur Suratnoaji, M.Si.

**UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
2015**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : REDESAIN SISTEM DAN PROGRAM SIARAN BERJARINGAN TV LOKAL SEBAGAI BASIS PENGUATAN MEDIA PERFORMANCE TV LOKAL DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF DI DAERAH (STUDI PADA TV LOKAL & JARINGAN di JAWA TIMUR)

Peneliti/Pelaksana
Nama Lengkap : SUROKIM S.Sos.,M.Si
Perguruan Tinggi : Universitas Trunojoyo
NIDN : 0022067404
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Nomor HP : 081330683681
Alamat surel (e-mail) : surochiema@gmail.com

Anggota (1)
Nama Lengkap : MUHTAR WAHYUDI M.A.
NIDN : 0006127207
Perguruan Tinggi : Universitas Trunojoyo
Institusi Mitra (jika ada) : -
Nama Institusi Mitra : -
Alamat : -
Penanggung Jawab : -
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 75.000.000,00
Biaya Keseluruhan : Rp 120.750.000,00



Mengetahui,
Dekan FISIB UTM

(DR. H. Moh. Amir Hamzah, SH, MH)
NIP/NIK 196109191988031003

Bangkalan, 16 - 11 - 2015
Ketua,

(SUROKIM S.Sos.,M.Si)
NIP/NIK 197406222008011007



Menyetujui,
Ka.LPPM

(H. M. Djaslim SE, M.Si, QIA)
NIP/NIK 197106112005011004

Ringkasan

Riset lanjutan tahun kedua ini dilakukan untuk menerapkan desain baru siaran berjaringan tv lokal berbasis regional yang dianggap sebagai jalan tengah bagi televisi lokal untuk dapat bersaing dengan televisi nasional dan jaringannya. Jaringan tv lokal regional ini dianggap sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan kekhasan penyiaran lokal di Indonesia yang tengah mengalami transisi, khususnya siaran kerja sama antartv lokal. Riset lanjutan ini juga akan mendalami bagaimana potensi dan daya dukung ekonomi bagi pengembangan industri tv lokal. Selain itu juga sebagai evaluasi atas penerapan sistem stasiun jaringan (SSJ) oleh tv lokal di wilayah siaran Jawa Timur. Secara khusus riset lanjutan ini bertujuan untuk 1) melihat kondisi tv lokal dan tv lokal jaringan di Jawa Timur dalam melaksanakan sistem siaran berjaringan regional, dan 2) memperoleh gambaran mengenai kesiapan program siaran, kelembagaan, dan teknologi penyiaran di daerah dalam bersiaran regional 3) memberi masukan atas desain siaran jaringan yang khas sesuai dengan kebutuhan penyiaran di Jawa Timur dan Indonesia.

Desain siaran televisi swasta berjaringan regional di Jawa Timur hingga kini masih menghadapi kendala dan tantangan. Televisi lokal yang bisa menerapkan desain ini dengan baik adalah tv lokal yang berada dalam satu korporasi seperti JTV. Televisi lokal ini dapat menerapkan sistem siaran jaringan regional karena telah memiliki anggota di 7 wilayah layanan siaran di Jawa Timur. Televisi JTV mampu menyamakan visi dan misi sebagai tv jaringan regional karena berada dalam satu induk organisasi bisnis Jawa Pos grup. Sementara TV lokal mandiri yang lain seperti Arek TV, TV9 belum bisa menerapkan desain ini karena beragam kendala. Beberapa kendala tersebut adalah 1) kejelasan status kelembagaan siaran jaringan yakni menyangkut status sebagai induk jaringan dan anggota, 2) kejelasan pembagian waktu siaran dan program, penyesuaian (*matching*) teknologi, dan pembagian hasil dan pendanaan. Dengan demikian desain ini dapat diterapkan dengan mudah diterapkan untuk tv lokal yang berada dalam satu induk korporasi dan menghadapi problem jika tidak berada dalam satu induk korporasi atau tv lokal mandiri yang tidak berada dalam grup.

Adapun daya dukung ekonomi, khususnya sumber pemasukan on air tv lokal mandiri yang *service areanya* meliputi hanya 2-3 kabupaten sebenarnya hanya efisien dan ekonomis untuk siaran 5-6 jam. Selebihnya akan efektif jika digunakan untuk siaran berjaringan. Kondisi tv lokal di Jawa Timur cukup beragam. Namun, secara umum *performance* televisi lokal masih jauh dari harapan sebagai lembaga penyiaran swasta yang sehat, mandiri, dan profesional. Bahkan, ada kecenderungan tv lokal mulai kesulitan untuk dapat bertahan akibat kompetisi bisnis penyiaran yang keras. Sistem siaran jaringan regional diyakini menjadi solusi terbaik bagi tv lokal untuk dapat bertahan dan mengembangkan diri pada masa yang akan datang. Penyempurnaan desain siaran berjaringan regional membutuhkan saling pengertian dan memahami kemanfaatan bersama yang saling menguntungkan diantara pengelola dan pemilik tv lokal.

Keywords: Implementasi Sistem, Desain Sistem Siaran Jaringan Regional, TV Lokal, Media Performance, Jawa Timur

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, khususnya karunia sehat dan ilmu pengetahuan hingga memungkinkan penelitian lanjutan ini dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai rencana. Penelitian ini merupakan riset kerja sama antarperguruan tinggi untuk tahun kedua guna mengimplementasikan dan mengevaluasi desain sistem siaran berjaringan (SSJ) berbasis regional yang bisa diterapkan tv lokal sesuai kondisi saat ini.

Implementasi desain baru ini menjadi terobosan dan diharapkan dapat meningkatkan wilayah layanan (*service area*) dan wilayah jangkauan (*coverage area*) sehingga menambah jumlah pemirsa dan daya saing program siaran tv lokal. Sistem siaran berjaringan regional merupakan sistem penyiaran berbasis regional wilayah provinsi yang merupakan tata kerja tv lokal tetap dalam satu provinsi sesuai dengan daya dukung ekonomi.

Semangat untuk membuat tv lokal sehat baik secara bisnis maupun siaran sejatinya adalah roh demokratisasi penyiaran. Diyakini industri tv lokal yang sehat secara bisnis akan dapat meningkatkan kualitas isi atau program siaran. Sistem SSJ berbasis regional ini adalah salah satu jawaban atas *policy* penyiaran yang pro-lokal sebagaimana cita-cita pembangunan penyiaran nasional dan sekaligus dan menjadi benteng pertahanan budaya daerah. Melalui SSJ regional ini diharapkan tv local dapat tumbuhkembang dan program lokal dapat bersaing dan digemari sehingga turut memperkuat identitas budaya nasional yang kukuh sebagaimana cita-cita dasar penyiaran nasional.

Penelitian ini telah dilakukan dengan baik sesuai dengan perencanaan dan telah mendapat masukan dari para pengampu (*stakeholders*) penyiaran, khususnya pengelola TV lokal di Jawa Timur. Pada riset kali ini juga telah dilakukan evaluasi menyangkut daya dukung ekonomi daerah yakni dalam kategori ekonomi maju dan daerah ekonomi kurang maju. Riset kali ini mencoba untuk mencari jalan tengah atas situasi tersebut dengan pola jaringan regional dan nasional sehingga program-program local akan dikembangkan pada jam tayang dimana program local mendapatkan ceruk pasar pemirsa yang optimal.

Laporan penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan TV local di Jawa Timur dan sekaligus sebagai penerapan sistem siaran jaringan regional khas penyiaran Indonesia.

Laporan akhir ini disusun secara sistematis agar dapat dipahami dengan mudah. Secara komprehensif dan sistematis laporan ini disusun atas beberapa bab, yaitu :

- BAB 1. PENDAHULUAN
- BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
- BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
- BAB 4. METODE PENELITIAN
- BAB 5. HASIL YANG DICAPAI
- BAB 6. TAHAPAN BERIKUTNYA
- BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN

Laporan akhir ini masih belum sempurna mengingat tingginya dinamika bisnis pertelevisian di Jawa Timur dan di Indonesia. Sebagai sebuah desain aksi, maka desain ini patut untuk dievaluasi dan diberikan masukan sehingga dapat memberi manfaat yang lebih luas bagi pengembangan tv lokal di Jawa Timur.

Agar laporan akhir ini memiliki bobot yang lebih berkualitas, maka kritik dan saran membangun dari semua pihak sangat diperlukan. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan pendanaan dari DP2M-Dikti. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan industri televisi lokal dan juga kontribusi bagi pengembangan sistem siaran berjaringan televisi lokal berbasis regional di Indonesia.

Bangkalan, November 2015



Surokim, S.Sos., M.Si
Peneliti Utama

Daftar Isi

	Hal
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	2
RINGKASAN	3
PRAKATA	4
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB 1. PENDAHULUAN	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	17
BAB 4. METODE PENELITIAN	19
BAB 5. HASIL YANG DICAPAI	22
BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA	34
BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN	35
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
Jurnal	
Buku Teks	
Poster	

BAB I

PENDAHULUAN

Riset lanjutan ini dilakukan di televisi (tv) lokal dan jaringan di wilayah Jawa Timur. Keberadaan televisi lokal di wilayah ini tercatat paling banyak di Indonesia yakni mencapai 37 stasiun. Kondisi dan *performance* televisi lokal di wilayah ini juga beragam dengan potret cukup unik. Ada tv lokal yang mampu tumbuh pesat hingga dapat bersaing dengan tv nasional, tetapi juga ada tv lokal yang sulit berkembang dan hanya sekadar mampu bertahan untuk sekadar bisa siaran.

Kondisi tv lokal di Jawa Timur disamping menghadapi persaingan dengan tv nasional juga bersaing dengan sesama tv lokal yang lain di wilayah layanan yang sama. Namun, permasalahan serius yang dihadapi oleh tv lokal di Jawa Timur adalah perbedaan kelas yang mencolok antara TV Jakarta (eksisting) dengan TV lokal. Televisi lokal juga menunjukkan *performance* berbeda antara tv lokal yang berada di kota besar dan tv lokal yang berada di kota sedang dan kecil bahkan pedesaan. Televisi nasional memiliki keunggulan dalam wilayah layanan dan wilayah jangkauan yang lebih luas sehingga mampu meraih pangsa pasar iklan nasional yang lebih besar. Sementara tv lokal hanya mampu mengais sisa-sisa dari iklan tv nasional.

Keadaan ini membuat eksistensi tv lokal kian berat. Alih-alih mendorong desentralisasi penyiaran, tv nasional justru membuat efisiensi penyiaran dengan hanya berorientasi pada pemenuhan isi siaran lokal, tetapi produksinya dilakukan secara sentral. Hal ini seperti dilakukan beberapa televisi nasional biro Surabaya. Mereka dalam merealisasikan siaran muatan lokal Jawa Timur dilakukan siaran *full* dari Jakarta. Biro lokal tv nasional yang kelak didorong untuk menjadi stasiun lokal justru diubah menjadi biro virtual. Semua proses produksi berita dilakukan di Jakarta dan biro lokal daerah hanya menjadi kontributor saja. Tidak ada aktivitas produksi di stasiun lokal Jawa Timur. Bahkan, proses marketing dan kegiatan *off air* yang lain semua dilakukan dari Jakarta. Biro lokal yang hendak didorong menjadi stasiun lokal pun tinggal angan-angan. Jika trend ini diikuti tv Jakarta maka SSJ semakin jauh dari kenyataan. Isi siaran muatan lokal hanya menjadi tebang semata untuk memenuhi ketentuan kewajiban siaran satu jam semata, dan tidak memiliki kontribusi langsung bagi kemajuan penyiaran dan ekonomi daerah.

Riset selama lima tahun terakhir (2007-2011) yang dilakukan peneliti menunjukkan tidak adanya *roadmap* yang jelas terkait pengembangan tv lokal di

tanah air. Program tv lokal seolah terjebak dalam euphoria politik penyiaran sehingga kemampuan mendirikan tv lokal tidak diikuti dengan kesiapan program, kelembagaan, bisnis dan teknis yang mapan. Hasil analisis peneliti terkait *performance* lembaga penyiaran tv lokal di Jawa Timur menunjukkan bahwa ada tiga aspek yakni problem kelembagaan, program, dan teknis dalam pengembangan kapasitas tv lokal. Data penelitian ini juga semakin meneguhkan bahwa sebenarnya TV lokal Jawa Timur sedang menghadapi situasi yang rumit dan sulit. TV lokal Jatim tidak saja harus berhadapan dengan kompetitor sesama TV lokal, tetapi juga harus menghadapi TV nasional yang unggul dalam jangkauan dan permodalan.

Riset lanjutan ini akan menerapkan desain baru siaran berjaringan yang lebih adil untuk dapat diterapkan di tv lokal Jawa Timur pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Penerapan desain baru ini juga dilengkapi dengan pengalaman terbaik dari berbagai negara sehingga diharapkan dengan adanya desain baru tersebut sistem siaran berjaringan dapat segera dilaksanakan dan ada *roadmap* yang jelas dalam implementasi dan pengembangannya pada masa depan.

Dengan desain baru ini diharapkan tv lokal dan tv nasional dapat berkembang secara beriringan dan saling mendukung satu sama lain serta memperoleh manfaat yang saling menguntungkan. Melalui kemitraan dengan TV lokal, TV nasional diharapkan akan dapat tampil impresif menjadi TV lokal berjaringan yang dekat (*proximity*) dengan pemirsa lokal. Dengan bermitra dengan TV lokal, TV nasional akan semakin luas daya jangkau di masing-masing wilayah layanan yang digarap sehingga meningkatkan daya saing. Bahkan kerja sama *sharing* teknik dengan mitra TV lokal di beberapa daerah terbukti bisa membantu kualitas siaran TV Jakarta yang semula tidak bisa maksimal menjadi lebih baik di terima oleh masyarakat lokal. Penerapan siaran berjaringan ini juga akan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional melalui keberagaman isi siaran (*diversity of content*) dan kepemilikan (*diversity of ownership*).

Sebagai upaya untuk melengkapi kajian tentang siaran jaringan dan agar diperoleh kajian yang komprehensif atas sistem siaran jaringan di Indonesia, maka diperlukan ujicoba mengenai penerapan sistem siaran berjaringan dengan metode konstruktivis untuk melengkapi gambaran sistem siaran berjaringan melalui pandangan para pelaku penyiaran baik di daerah maupun di pusat Jakarta.

Penelitian lanjutan ini penting dilakukan mengingat amanah undang-undang penyiaran 32/2002 yang mendorong media penyiaran sebagai jangkar dan pemelihara

persatuan dan kesatuan nasional. Riset lanjutan ini juga strategis agar tv lokal dalam menjalankan tugas desentralisasi penyiaran dapat tumbuh dengan sehat dan profesional yang mampu bekerja sama dengan tv nasional.

Pengembangan siaran berjaringan bagi daerah akan membawa manfaat yang besar, disamping mendekatkan siaran juga membawa dampak atas ekonomi penyiaran di daerah tersebut. Industri kreatif seperti *production house* masyarakat lokal juga mampu berkembang di berbagai daerah sehingga cukup memberi dampak secara ekonomis dan memberi peluang penambahan lapangan kerja. Riset lanjutan ini sungguh strategis sebagai bagian dari menempatkan industri tv lokal sebagai tuan rumah di wilayahnya masing-masing

Penelitian lanjutan ini akan memberi kontribusi pada penerapan sistem siaran berjaringan di Indonesia yang mandek karena tidak adanya inisiatif kedua belah pihak secara menguntungkan. Kedua belah pihak masih menunggu (*wait and see*) dan regulasi teknis di bidang SSJ juga masih belum bisa dilaksanakan akibat pertentangan oleh masing-masing pihak.

Diharapkan dengan adanya uji coba desain ini akan diketahui secara mendetail bagaimana aspek program, kelembagaan, dan teknologi penyiaran local dapat dikembangkan. Selanjutnya dari kondisi itu dapat disusun *roadmap* pengembangan SSJ secara berkelanjutan yang dapat diterapkan bagi pengembangan tv local dan jaringan di Indonesia. Paling tidak terdapat progress bagi pengembangan tv jaringan di daerah. Adapun target/indikator keberhasilan dalam penelitian ini dapat dideskripsikan sebagai berikut

No.	Aspek Penelitian	Tolok Ukur	Cara Pengukuran
1	Performance TV lokal	Kelembagaan, program siaran, bisnis dan teknologi	Dokumen, observasi, wawancara
2	Performance TV Jaringan	Kelembagaan, program, bisnis,	Dokumen, observasi,
3	Daya dukung ekonomi	Kondisi ekonomi lokal	Dokumen, observasi,
4	Daya dukung politik	Kondisi politik lokal	Dokumen, observasi,
5	Daya dukung Budaya	Kondisi budaya lokal	Dokumen, observasi,
6	Daya dukung kelompok	Kondisi masyarakat penyiaran	Dokumen, observasi,
7	Daya dukung Regulasi Teknis	Ketersediaan payung hukum	Dokumen, observasi,
8	Evaluasi Pemodelan	SSJ negara lain SSJ daerah	Telaah peneliti

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Demokratisasi Penyiaran

Demokratisasi penyiaran merupakan tuntutan publik, khususnya dalam berkomunikasi sebagai hak publik (*publik good*) dan sekaligus pengakuan daulat publik atas ranah publik (*public domain*). Spektrum frekuensi yang digunakan untuk penyiaran harus diatur sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Gagasan demokratisasi penyiaran meliputi (1) independensi, (2) pluralitas kepemilikan dan orientasi lembaga serta isi dan (3) desentralisasi atau dekonsentrasi penyiaran dari Jakarta ke daerah.

Demokratisasi penyiaran di Indonesia meliputi : 1) independensi SDM (SDM dan institusi siaran), 2) pluralitas kepemilikan, pengelolaan dan orientasi isi siaran, dan 3) desentralisasi dan otonominasi penyiaran. Sementara, demokratisasi penyiaran bertumpu pada dua pilar utama yaitu: 1) demokratisasi sebagai jaminan tidak adanya intervensi pada muatan isi dan perbincangan di media penyiaran dalam bentuk apapun. 2) keterbukaan bagi partisipasi semua pihak secara setara dan independen.

Adapun Faktor-faktor yang menentukan demokratisasi siaran yaitu : 1) ideologi ekonomi-politik (pilihan visi-misi dan filosofi), 2) pihak eksternal (pengiklan, pemerintah dan masyarakat), 3) manajemen stasiun media (pemilik dan keputusan rutin), 4) kekuatan kritis-demokratis (akademisi, LSM, ormas dll), dan 5) *Broadcaster* (penyiar, reporter, editor)

Perubahan penyiaran meliputi: 1) Pergeseran orientasi penyiaran, dari medium artikulasi kepentingan negara ke medium aktualisasi dinamika pasar. 2) Pergeseran substansi kepemilikan, dari private-state-non-profit ke *community-public-profit*. 3) Pergeseran materi siaran, dari hiburan (musik) ke jurnalistik. 4) Pergeseran kemasan siaran, dari monolog-reaktif ke dialog interaktif. Dan 5) pergeseran teknologi, dari era analog ke era digital.

Strategi regulasi merupakan gabungan dari dua aliran gerakan demokratisasi penyiaran, yaitu model *naturally* (diserahkan pada mekanisme pasar) oleh Abraran dan model *organized* (melalui aturan main) oleh James Curran. Pilihan strategi *organized* melalui regulasi yang disusun bersama negara penyiaran efeknya bersifat generik dan perumusannya rentan dengan KKN. Oleh karena itu pilihan pembuatan Undang yang mengatur iklim penyiaran (UU Penyiaran No 32 Tahun 2002) merupakan pilihan terbaik di antara pilihan yang buruk) Di dalam UU Penyiaran No 32 Tahun 2002 terhadap pemberlakuan prinsip desentralisasi. Yang berarti televisi komersial harus menghentikan bentuk siaran nasional dan harus berkolaborasi dengan televisi lokal.

Teori Tanggungjawab Sosial

Undang Undang No.32/2002 tentang Penyiaran sejatinya telah membuka kesempatan bagi pertumbuhan media penyiaran lokal di berbagai daerah yang pada gilirannya berdampak positif terhadap dinamika pembangunan suatu daerah. Regulasi fundamental ini membuka pintu bagi masyarakat daerah untuk mendirikan lembaga penyiaran yang sesuai dengan watak, adat, budaya dan tatanan nilai norma setempat.

Jika dilihat pertain, sebenarnya regulasi penyiaran Indonesia tidak menganut aliran liberalisme pasar murni, tetapi lebih dekat dengan teori tanggungjawab sosial. Teori ini memunculkan konsep *diversity of content* dan *diversity of ownership* yang dalam beberapa hal memberi perlindungan terhadap potensi lokal dan pembatasan kepemilikan. Salah satu implementasinya adalah dalam bentuk berjaringan antara TV Nasional dan TV Lokal. Dalam format penyiaran itu, sebenarnya tidak akan terjadi *head to head* antara TV Jakarta yang bersiaran nasional dan TV lokal yang bersiaran terbatas.

Regulasi ini juga memberi celah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang penyiaran dan menjadi subyek, tuan rumah di daerahnya sendiri. Keberadaan media penyiaran lokal juga sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam konteks pembangunan baik di bidang sosial, ekonomi, politik maupun budaya.

Penguatan muatan lokal dalam penyiaran nasional, juga dimaksudkan sebagai benteng pertahanan budaya nasional akibat pengaruh globalisasi. Dengan demikian kuasa budaya lokal dalam media juga menjadi pertarungan. Globalisasi dalam konteks tertentu memang tidak melulu memproduksi budaya global yang homogen. Kini, di tingkat global juga sedang diwarnai dengan tuntutan muatan lokal (*a cultural quota*) dan menjadi bagian dari strategi bisnis korporasi media internasional (Rahayu dalam Siregar, 2010). Mereka juga memahami jika masyarakat lokal memiliki kapasitas untuk ikut menegosiasikan, bahkan menolak produk global tersebut. Penambahan muatan lokal dalam skema bisnis media global sejatinya juga bagian dari strategi ekspansi pasar media global.

Lokalitas diyakini akan menjadi kekuatan ekspansi pasar karena relasi dan sentimen budaya. Hal ini yang diyakini akan mendorong, menentukan dan mengatur *sense of belonging* dan *sense of identity* pasar lokal. Selain itu, kajian budaya media juga memperingatkan bahwa produk media yang melintas batas negara atau budaya akan diterima atau direspons dengan cara-cara yang spesifik (*locally specific way*) (Lee, Rahayu, dalam Siregar 2010).

Aliran penyiaran sebagaimana yang dianut dalam undang-undang penyiaran 32/2002 adalah tanggungjawab sosial, yang sebenarnya merupakan jalan tengah antara aliran libertarian dan otoritarian. Dalam aliran itu, maka industri TV harus turut bertanggungjawab untuk bisa menimbang-nimbang asas manfaat bagi publik. Media tv selain mengemban amanah untuk menghibur juga memiliki tanggungjawab moral untuk melakukan edukasi dan kontrol sosial.

Sistem Siaran Televisi Berjaringan

Primasanti (2009) mengutip Head dan Sterling (1987) mendefinisikan siaran berjaringan atau *network broadcasting system* sebagai, "...two or more stations interconnected by some means of relay (wire, cable, terrestrial microwaves, satellites". Sedangkan Hiebert, Ungurait, Bohn (1974: 265) menekankan pada aspek organisasional dengan mengatakan bahwa siaran berjaringan merupakan pengorganisasian program, marketing, teknis dan administrasi dari beberapa stasiun oleh sebuah stasiun jaringan.

Sementara Siregar (2001: 27) mengatakan bahwa sistem penyiaran jaringan, yaitu adanya suatu stasiun induk dengan sejumlah stasiun lokal yang menjadi periferal dalam penyiaran. Hubungan stasiun induk dengan stasiun lokal berupa pemilikan penuh atau persahaman, dan bersifat terkait dalam pasokan (*feeding*) program. Siaran berjaringan secara umum diartikan sebagai sistem pemasokan siaran secara sentral kepada sejumlah stasiun penyiaran (Siregar, 2001:10).

Primasanti (2009) merujuk pada hasil laporan penelitian Putra (1992) juga merangkum bahwa, "*Televisi jaringan merupakan sebuah kelompok televisi lokal, berhubung secara bersama, secara elektronik, sehingga program bisa disuplai melalui sumber tunggal yang bisa disiarkan secara serentak*". Sedangkan Indonesia, dengan memberi aksentuasi pada konsep kemitraan, UU No 32/ 2002 tentang Penyiaran menyepakati konsep siaran berjaringan sebagai kemitraan antara stasiun penyiaran lokal dengan stasiun yang bersiaran secara nasional. *Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal.*

Dengan demikian siaran berjaringan secara umum dapat dilihat sebagai sistem penyiaran yang terdiri dari dua sub sistem, yakni stasiun induk jaringan dan anggota jaringan yang memiliki hubungan "tertentu". Selanjutnya keberadaan sistem siaran berjaringan hendaknya dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi serta aspek-aspek krusial yang membentuk sebuah sistem.

Sistem siaran televisi berjaringan di Indonesia sejatinya adalah sistem siaran berjaringan nasional-lokal, mengingat sistem siaran berjaringan seringkali dimaknai secara berbeda-beda.

Pengembangan sistem penyiaran bisanya dipengaruhi aspek geografis, demografis, linguistik, ekonomi, budaya dan tekanan politis dalam suatu negara atau dari negara tetangganya. Bahkan Browne mengatakan tidak ada satu pun sistem penyiaran yang lengkap, sempurna dan cukup untuk dikatakan ideal (Brown, 1989:3). Perbedaan cara dalam menerapkan elemen-elemen sistem penyiaran membuat sebuah sistem siaran yang satu berbeda dengan yang lain (Summers, Summers and Pennybacker, 1978: 19).

Seperti sistem siaran pada umumnya, di dalam sistem siaran televisi berjaringan juga terdapat aspek yang menentukan karakter sistem yang diterapkan. Untuk mengetahui aspek-aspek krusial tersebut, perlu kiranya membaca pandangan Summers, Summers *and* Pennybacker dan Browne. Summers, Summers *and* Pennybacker (1978: 19) sebagaimana dikutip Primasanti (2009) mengemukakan dua aspek krusial. *Pertama*, berkaitan dengan mekanisme kontrol, dengan tiga kategori:

1. *state ownership*: fasilitas penyiaran dimiliki secara langsung oleh pemerintah dengan aktivitas penyiaran dibawah pengawasan pemerintah atau komite yang telah ditunjuk oleh pemerintah.
2. *autonomous corporation*: fasilitas penyiaran dimiliki dan dioperasikan oleh korporasi yang –walaupun dimiliki pemerintah—hampir seluruhnya independen dari kekuatan pemerintah.
3. *private ownership*: fasilitas penyiaran dimiliki dan dioperasikan oleh korporasi individu swasta, biasanya diatur dalam beberapa cara oleh badan pemerintah. Kedua yakni aspek perencanaan keuangan (Summers, Summers *and* Pennybacker, 1978: 19). Pada sistem penyiaran secara umum, perencanaan keuangan ini yang juga terdiri dari tiga kategori:
 1. *Tax support* : cara pendanaan utamanya melalui pajak.
 2. *Licence support* : utamanya didukung oleh pembayaran ijin yang dibayar setiap tahun oleh pemilik perangkat radio atau televisi.
 3. *advertiser support*: didukung utamanya oleh penjualan iklan untuk kepentingan bisnis dan layanan yang berharap untuk dapat mendistribusikan pesannya kepada sejumlah besar khalayak.

Brown (1989: 17-59) juga memaparkan aspek krusial dalam lembaga penyiaran, yakni; *financing* (cara pendanaan) , *supervision, control and influence* (pengawasan, kontrol dan pengaruh); *communication policy* (kebijakan komunikasi); *broadcasteraudienceinteraction* (interaksi dengan audien); dan *programming* (pemrograman). Mengelaborasi pemikiran Summer, Summer *and* Pennybacker dan Browne tersebut, dapat ditarik beberapa aspek yang juga membentuk sistem siaran berjaringan yakni: cara pendanaan; mekanisme kontrol dan pengawasan; sertapemrograman. Beberapa aspek ini mewujud dalam

karakter yang spesifik sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan oleh sistem siaran berjaringan yang diterapkan. Dengan demikian, aspek yang mampu membentuk sistem siaran berjaringan adalah aspek yang sesuai untuk mendukung tujuan sistem siaran berjaringan yang diterapkan.

Fundamentalisme Pasar dan Kontestasi Media

Dogma fundamentalisme pasar adalah *the logic of accumulation and exclusion*. (Hidayat, 2003: 8). Dogma ini mendorong ke arah komoditas media. Kaidah alami yang berlaku dalam mekanisme pasar adalah rasionalisasi dan maksimalisasi produksi dan akumulasi modal. Fundamentalisme pasar identik dengan neo-liberalisme yang menempatkan segala kehidupan ini berorientasi pada komoditas dan aset ekonomi dan bisa diperjualbelikan.

Kebebasan dalam konsepsi fundamentalisme pasar lebih banyak diformulasikan sebagai kebebasan bagi individu untuk melakukan akumulasi keuntungan dan juga kebebasan mobilitas bagi barang, jasa, dan modal. Dengan demikian semua keputusan diserahkan kepada mekanisme dan kekuatan pasar.

Market regulation ini mengarah pada rezim kapital yang mendasarkan pada kaidah rasionalitas instrumental mekanisme produksi-konsumsi dan keuntungan serta logika *never ending circuit of capital accumulation*, yakni M-C-M (*money-Commodities-More Money*) dengan sistematis dan konsisten menciptakan struktur pasar yang selaras dengan kaidah-kaidah pasar. Dalam konteks ini maka isi media akan banyak mengeksploitasi tayangan yang memenuhi persyaratan sebagai komoditas informasi dan hiburan. Pasar sekaligus akan mendikte isu-isu apa saja yang layak tayang sesuai dengan kepentingan mayoritas kelas utama konsumen media yang memiliki daya beli.

Kaidah akumulasi modal juga akan menseleksi kelompok atau individu yang bisa mengakses media. Kelompok dan individu yang memiliki surplus kekuasaan dan ekonomi saja yang bisa mengakses media secara leluasa dan sekaligus mendepak keluar institusi media yang tidak mematuhi konstitusi rejim kapital sesuai dengan kepentingan ekonomi periklanan.

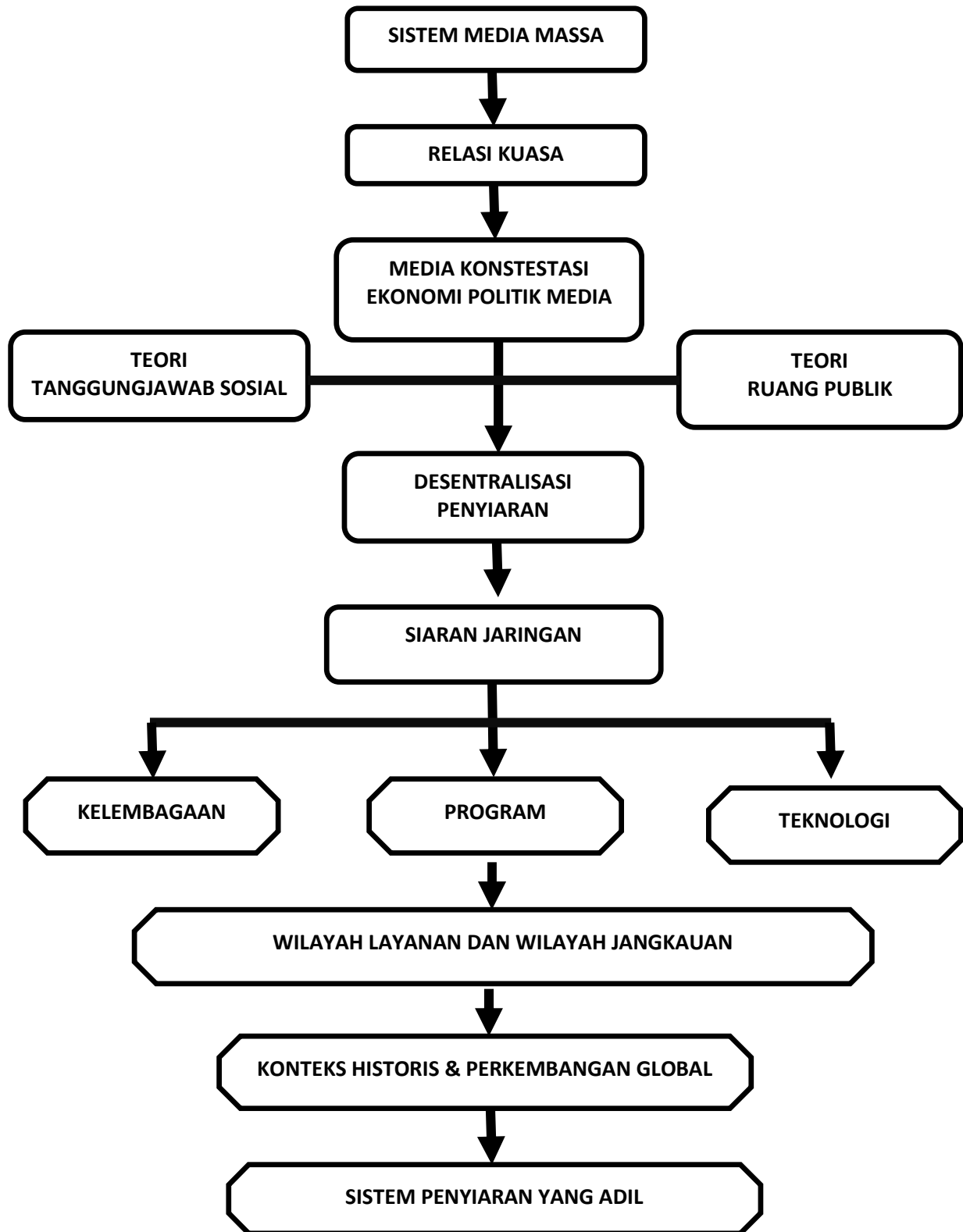
Dalam mekanisme pasar, rasionalitas maksimalisasi produksi dan akumulasi modal berpotensi memunculkan konglomerasi, konsentrasi, kepemusatan kepemilikan modal dan kepemilikan media pada kelompok yang menguasai modal.

Dilevel produksi kaidah pasar juga akan menempatkan para jurnalis sebagai skrup besar pemain industri media. Para jurnalis hanya menjadi salah satu faktor produksi dalam proses produksi komoditas informasi dan hiburan. Pertimbangan efisiensi menjadi utama dalam relasi ini.

Dogma neo-liberalisme juga meyakini bahwa *the greater the play of market forces, the greater the freedom of the press, the greater the freedom of the press, the greater the freedom of the audience choice*. Dengan demikian *leave things to the market*.

Dalam konteks ini sesungguhnya pasar adalah wilayah yang sedang diperebutkan (*contested terrain*) dan mereka yang memiliki surplus ekonomi biasanya yang akan keluar sebagai pemenang.

**Bagan 1
Kerangka Pikir Penelitian**



BAB III

TUJUAN & MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan

Riset lanjutan ini merupakan riset aksi dan berusaha untuk menerapkan desain baru dalam pelaksanaan siaran berjaringan (SSJ) di Indonesia. Dengan melihat langsung pengalaman tv lokal dan memperhatikan masukan dan revisi dari para praktisi dan *stakeholders* penyiaran, riset ini akan menghasilkan desain baru yang cocok dan aplikatif bagi pengembangan kerja sama dan jaringan tv lokal di Indonesia. Riset ini sekaligus dapat menjadi panduan bagi pengembangan program tv lokal sehingga sehingga bisa berkompetisi pada pemirsa yang lebih luas.

Tujuan khusus riset ini adalah perbaikan desain siaran jaringan yang telah ada selama ini dan dapat diterapkan (*aplicable*) dan cocok untuk diterapkan dilapangan. Dengan adanya desain ini diharapkan sistem jaringan tv lokal dapat dikembangkan untuk memberi nilai tambah bagi perkembangan dan kemajuan tv lokal. Dengan *coverage* yang lebih luas diharapkan dapat meningkatkan fungsi pemasaran program dan juga daya saing. Secara khusus riset ini juga bertujuan untuk memberikan panduan bagi pengelola tv lokal terkait dengan manajemen kelembagaan, program, teknis teknologi sebagai basis peningkatan mutu manajemen tv local.

Melalui siaran berjaringan diharapkan akan dapat memberi nilai tambah bagi kedua belah pihak sekaligus dapat menghidupkan dan memperkaya siaran tv lokal dengan memperluas *coverage area*, memperbesar *audience share*, dan memperbesar peluang marketing.

Riset ini juga akan menjadi medium berbagi pengalaman terbaik (*best practice*) bagi pengelola tv lokal untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas manajemen dan produksi dan tayangan televisi lokal sehingga tv lokal memiliki daya saing dan daya survival dan kompetitif yang lebih baik.

3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan mengingat amanah undang-undang penyiaran yang mendorong media penyiaran demokratis guna memperkuat industri televisi daerah dan juga persatuan bangsa. Televisi lokal sebagai salah satu aset bangsa harus mampu dipelihara dengan memberikan peluang yang lebih besar untuk berkembang. Sistem siaran jaringan merupakan salah satu upaya untuk menjadikan TV lokal memiliki daya saing lebih tinggi, khususnya berkaitan dengan fungsi pengembangan kapasitas manajemen dan pemasaran program.

Televisi lokal harus didorong untuk mampu bertahan dan berkembang secara profesional melalui sistem yang lebih adil. Riset ini juga strategis agar tv lokal dalam menjalankan tugas desentralisasi penyiaran yang bertumpu pada partisipasi dan budaya lokal dapat berkembang secara sehat baik program maupun bisnisnya. Realitas dilapangan, saat ini banyak tv lokal terpaksa bertahan hidup dan sebagian tutup karena minimnya kemampuan dalam produksi program siaran dan perolehan pemirsa yang tidak signifikan guna meraih iklan.

Riset ini sungguh strategis sebagai bagian dari menempatkan industri tv lokal sebagai tuan rumah di wilayahnya masing-masing ditengah tekanan media utama (*media-mainstream*) nasional. Manfaat dari riset ini adalah munculnya pemahaman dan paradigma baru bagi pengelola tv lokal dalam mengembangkan kapasitas manajemen program dan bisnis. Para pengelola tv lokal diharapkan dapat memberikan sentuhan khas pada program yang mereka produksi dengan mengacu pada desain kelembagaan, program, dan teknologi yang yang ditemukan dalam riset ini. Selain itu, para pengelola tv lokal juga memiliki kemampuan untuk mengembangkan program dan bisnis media secara berkelanjutan.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma partisipatoris (denzin dan Lincoln, 2005). Paradigma ini menekankan pada keteterlibatan peneliti dalam aksi lapangan bersama dengan para pelaku. Peneliti akan mendapat pengalaman bersama secara langsung dengan para pelaku dan bisa merumuskan solusi bersama dengan para pelaku, khususnya para pelaku tv lokal. Paradigma partisipatoris menganut cara aberfikir bahwa penelitian harus ditujukan untuk menjawab problem sosial dan mempromosikan dilakukannya riset aksi yang juga berorientasi pada pemecahan masalah sosial (Hamad, 2006:4).

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yang mendasarkan diri pada aspek *reflective*. Dimana kedudukan suatu penelitian bersifat menggali interpretasi subyek. Peneliti harus mampu mempertanggungjawabkan/menjelaskan peran peneliti dalam tindakan sosial, menjadikan peneliti peka untuk dapat membedakan keadaan/lapisan realitas dalam sebuah latar/suasana dimana realitas itu berada (Lindlof, 1995). Beberapa karakteristik kunci dari berbagai desain penelitian kualitatif meliputi interpretif (juga disebut sebagai bentuk, tipe, atau *genre* oleh beragam pengarang).

Interpretasi kualitatif dihasilkan dari analisa intensif pada kasus tunggal, atau biasa juga beberapa kasus. Pengetahuan yang dalam diperoleh dari sub-sub budaya, organisasi-organisasi, dan komunitas-komunitas. Data-data yang diperoleh darinya akan menjadi catatan/laporan dan menyingkapkan pemahaman yang mendalam bagi peneliti (Lindlof, 1995).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah *case study* (study kasus) yakni sebuah metode penelitian dalam pendekatan kualitatif yang berusaha menggali proses (*explore a process*) terjadinya suatu kasus dengan menjawab pertanyaan

mengapa dan bagaimana kasus itu terjadi (Cresswell, 1994:68). Dengan mendalami proses kasus atau masalahnya dilapangan dan mendasarkan prinsip *local knowledge* maka studi kasus akan memperoleh pemecahan masalah serta rencana aksi secara kontekstual.

Riset aksi ini akan menghasilkan pengetahuan yang kolaboratif antara pengetahuan lokal (*local knowledge*) dan pengetahuan profesional (*professional knowledge*) sebagai hasil kerja sama antara peneliti ahli dan stakeholders lokal yang menguasai kondisi sosial mereka.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, yaitu melakukan identifikasi nilai-nilai kultural yang tumbuh dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Jenis observasinya adalah *participant observation*, artinya peneliti terlibat secara langsung dalam pengamatan terhadap nilai-nilai kultural dalam latar alamiah (*naturalistics setting*) masyarakat dan *performance* lembaga penyiaran di wilayah Jawa Timur.

2. Wawancara/*Indepth Interview*

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disesuaikan dengan kerangka konseptual kepada para informan terpilih

3. Diskusi ahli

4. Data sekunder

Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan adalah purposif (*purposive sampling*), untuk memastikan bahwa unsur tertentu dimasukkan ke dalam sample. Tingginya tingkat selektifitas yang ada pada teknik ini akan menjamin semua tingkatan/strata yang relevan direpresentasikan dalam rancangan peneliti tertentu. Unsur khas yang ingin dimasukkan adalah kapasitas pengetahuan dan pengalaman serta budaya masyarakat Jawa Timur yang akan dijadikan basis dalam menyusun desain siaran jaringan dan program televisi lokal (James A. Black & Dean J. Champion, 1999). Populasi penelitian ini meliputi masyarakat penyiaran dan tv lokal di Jawa Timur.

Teknik Analisa Data

Data yang dihimpun selanjutnya dianalisis dengan teknis analisis sistem. Sebagai proses *cogenerative inquiry*, proses pengumpulan data dan analisis data harus sistemik dengan memadukan pengetahuan lokal dan pengetahuan profesional. Kedua belah pihak berinteraksi secara setara dalam menemukan dan merancang proses perubahan sosial yang dianggap efektif. Riset aksi bermaksud memecahkan masalah yang terkait dengan konteks khas lokal. Laporan riset aksi berupa paparan data yang relevan dengan masalah khas lokal dan memberinya rancangan perubahan sosial yang sesuai dengan karakteristik lokal itu. Riset aksi bertujuan untuk menemukan jawaban atas masalah sosial (merumuskan rancangan perubahan sosial), tetapi bukan hanya problem solving sendiri, tetapi bersama orang lain untuk menemukan masalah sosial itu bersama. (Hamad, 2006:9)

Langkah analisis didahului dengan tahapan memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan dan memeriksa kesesuaian data dengan rencana pengumpulan data. Selanjutnya adalah melakukan klasifikasi, reduksi, dan interpretasi terhadap data yang telah dihimpun. Menemukan pola tiap tiap cluster data dan tarik benang merah diantara cluster yang satu dengan lainnya. Kemudian membawa analisis data itu ke arah penemuan rencana aksi. Dialog dengan stakeholders lokal ketika melakukan analisis data. Konfirmasi (minta persetujuan) kepada stakeholders lokal atas hasil riset itu.

Teknik keabsahan, keterandalan dan kredibilitas

Teknis keabsahan, keterandalan, dan kredibilitas hasil riset diukur dari kesediaan stakeholders lokal menyetujui hasil riset. Ini merupakan konsekuensi dari riset aksi yang bersifat kogeneratif dan kolaboratif.

4.2 Lokasi Penelitian

Lokasi riset ini adalah Jawa Timur yang memiliki 37 stasiun penyiaran lokal. Stasiun tv yang diriset adalah stasiun tv yang berada dalam wilayah yang mewakili gambaran budaya Jawa Timur, mewakili tipikal khas geografis, dan daya dukung dukungan ekonomi. Hal ini agar diperoleh gambaran yang komprehensif terkait performance tv lokal dan pola jaringan tv lokal regional Jawa Timur.

BAB V

HASIL YANG DICAPAI

5.1. Implementasi Model Siaran Jaringan Regional di Jawa Timur

Implementasi siaran jaringan regional diterapkan pada dua jenis media tv lokal yakni tv lokal mandiri (*non-group korporate*) dan tv lokal (*group korporate*). Implementasi desain ini dapat berjalan dengan baik pada televisi lokal yang berada dalam satu induk perusahaan seperti JTV milik corporate Jawa Pos grup. Sementara tv lokal mandiri yang tidak tergabung dalam grup menghadapi masalah yang rumit menyangkut kejelasan kelembagaan, program siaran, dan penggunaan teknologi siaran, serta pembagian pendapatan.

Pada tv lokal anggota jaringan korporasi, tv lokal pada awalnya statusnya adalah anggota tv induk yang berada di ibukota provinsi. Mereka bukan murni tv lokal mandiri, tetapi melakukan pemancarulan terhadap stasiun induk yang berada di ibukota provinsi. Tv lokal ini sejatinya adalah stasiun pemancar dan melakukan siaran pada jam-jam nonprime time induk jaringan. Pembiayaan sebagian besar ditopang oleh korporate induk dan hanya membiayai operasional sdm dan pemeliharaan kantor. Status pemimpin sebagian besar adalah pegawai induk jaringan. Hal inilah yang memudahkan pelaksanaan sistem jaringan regional ini diaplikasikan.

Sementara bagi tv lokal mandiri yang sejak awal tidak memiliki induk korporasi jika harus menerapkan sistem jaringan ini sejak awal harus mengalah bahwa status mereka adalah anggota jaringan. Sementara tv lokal mandiri yang berada di ibukota provinsi bertindak sebagai induk jaringan. Hal ini yang menyulitkan kerja sama pada tahap awal mengingat tv lokal khususnya para pemilik memiliki ego dan kepentingan politik, ekonomi yang berbeda. Tantangan tidak hanya berada pada aspek kelembagaan, tetapi juga sinkronisasi program, teknologi dan pembagian hasil.

Pilihan berjaringan baik bagi stasiun mandiri maupun anggota bisnis pada dasarnya sama-sama menghadapi masalah yakni wilayah layanan dan jangkauan siaran yang terbatas. Berjaringan akan membuat wilayah siaran menjadi lebih luas dan meningkatkan *share* pemirsa.

Jika dilihat dari daya dukung ekonomi, maka keberadaan tv lokal di beberapa wilayah layanan, khususnya di daerah kurang maju maka tidak ekonomis bagi dukungan industri periklanan. Biaya operasional cenderung lebih besar jika dibandingkan dengan pemasukan dan daya dukung ekonomi di kawasan tersebut. Dengan demikian bagi beberapa tv lokal yang beroperasi di wilayah layanan kurang maju maka pilihan jaringan ini akan bisa menambah daya saing khususnya dalam menambah share pemirsa dan wilayah layanan.

Dengan demikian sebenarnya pilihan siaran berjaringan regional ini akan bis amemberi manfaat bagi kedua belah pihak jika dilakukan secara profesional dengan bertumpu pada kejelasan MoU atas aspek-aspek manajerial yang dikerja samakan mulai dari kelembagaan, program maupun teknologi.

Sistem siaran jaringan tv lokal berbasis regional ini adalah tata kerja (kerjasama) antar lembaga penyiaran yang dikembangkan dengan berbasis wilayah provinsi. Wilayah layanan dan jangkauan siaran jaringan regional dikembangkan melalui kerja sama jaringan tv lokal yang meliputi beberapa wilayahan layanan kabupaten dalam satu provinsi. Induk jaringan tv regional akan berada di ibukota provinsi dan melakukan kerja sama dengan tv jaringan diluar propinsi guna melakukan siaran jaringan nasional. Dengan demikian siaran berjaringan dilakukan secara bertingkat mulai dari siaran regional hingga siaran nasional.

Televisi lokal yang bertindak sebagai induk jaringan juga akan memperoleh *revenue* lebih jika dihitung cermat. Memang kelihatan pada awal akan mengurangi jumlah pendapatan, tetapi jika dihitung secara serius format ini dalam jangka panjang akan turut memperkuat struktur bisnis TV lokal di masing-masing daerah. Memang jika dihitung dalam jangka pendek, kecepatan akumulasi keuntungan akan mengalami pengurangan *share* bisnis karena harus *sharing* dengan mitra TV lokal. Namun, jika menilik kepentingan jangka panjang konsep berjaringan ini akan menciptakan peluang lebih besar, khususnya untuk menjaring potensi pasar dan pemirsa lokal. Agus Sudibyo (2007) pernah menggambarkan jika *rating* dan *share audience* TV induk selama ini hanya memperhitungkan pemirsa TV di kota-kota maka dengan SSJ akan memperoleh tambahan pemirsa lokal yang lebih luas di daerah yang selama ini belum tergarap khususnya di daerah baru. Hal ini akan turut memperkuat daya tawar TV di kalangan pemasang iklan nasional dan lokal.

Melalui kemitraan dengan TV lokal, TV induk akan tampil impresif menjadi TV lokal berjaringan yang dekat (*proximity*) dengan pemirsa lokal. Dengan bermitra dengan TV lokal, TV induk akan semakin luas daya jangkauan di masing-masing wilayah layanan yang digarap sehingga meningkatkan daya saing. Bahkan kerja sama *sharing* teknik dengan mitra TV lokal di beberapa daerah terbukti bisa membantu kualitas siaran TV induk yang semula tidak bisa maksimal menjadi lebih baik di terima oleh masyarakat lokal.

Desain itu adalah tata kerja (*kerjasama*) antar lembaga penyiaran yang dikembangkan dengan mempertimbangan wilayah layanan dan wilayah jangkauan. Wilayah layanan SSJ dikembangkan melalui kerja sama jaringan tv lokal dalam satu propinsi sehingga menjadi jaringan siaran regional. Induk jaringan tv regional akan melakukan kerja sama dengan tv diluar propinsi guna siaran jaringan nasional. Dengan demikian SSJ dilakukan secara bertingkat mulai dari siaran regional hingga siaran nasional.

Program siaran yang dapat dikembangkan untuk kepentingan siaran berjaringan ini adalah mengembangkan program siaran berbasis budaya sesuai dengan kebutuhan jaringan baik di tingkat lokal, regional dan program nasional dengan bertumpu pada keunikan dan daya tarik. Program siaran berbasis budaya ini dikembangkan agar program tv lokal menjadi benteng pertahanan budaya lokal dan terlihat aspek *proximity*. Dalam konteks budaya Jawa Timur maka isi siaran dapat dikembangkan budaya ditingkat regional dengan mencermati budaya Jawa Timur.

Kelembagaan siaran berjaringan dapat disesuaikan dengan memperjelas sistem operasional dan bisnis. TV lokal tidak lagi menjadi stasiun independen murni, tetapi sebagai anggota afiliasi jaringan dengan memanfaatkan siaran yang ekonomis sesuai daya dukung dan potensi ekonomi setempat. Kelembagaan ini juga harus memperhitungkan soal kejelasan atas penggunaan aset investasi antar induk dan anggota. SDM juga harus diputuskan menjadi pegawai induk atau anak jaringan.

Teknis teknologi memegang peranan penting dalam siaran jaringan. TV lokal harus memiliki kapasitas untuk melakukan penyesuaian dengan standar tv induk mitra jaringan dengan demikian kapasitas teknologi sama dengan induk jaringan. Prinsip dasar adalah suport teknologi telah dikuasai tv lokal dengan

standardisasi yang telah disepakati sehingga tidak terjadi gap antara kualitas program yang diproduksi anggota jaringan dan induk jaringan.

Guna menjamin keberlangsungan tv lokal dan jaringan maka tv lokal harus mampu mengembangkan sistem manajemen responsip sesuai dengan perkembangan lingkungan baik ditingkat lokal, regional, nasional maupun global.

Melalui siaran tv lokal berbasis wilayah propinsi maka siaran dapat dinikmati masyarakat se Jawa Timur dan sekaligus dapat menghidupkan dan memperkaya siaran tv lokal mitra. Disamping itu juga memperluas coverage area, memperbesar audience share dan memperbesar peluang marketing.

5.2 Evaluasi atas Implementasi Desain Siaran Jaringan TV local Berbasis Regional Provinsi

Sistem siaran jaringan sebenarnya merupakan peralihan dari sistem siaran sentralistik ke penyiaran desentralistik. Sistem ini mampu mewujudkan pemetaan ekonomi dan juga menambah lapangan kerja baru di daerah seperti griya produksi dan periklanan di daerah. Siaran berjaringan merupakan solusi atas keterbatasan wilayah jangkauan dan wilayah layanan siaran yang dihadapi oleh tv lokal di daerah. Dengan siaran jaringan, pengelola tv lokal dapat meningkatkan *audience share* dan memperluas marketing pogram. Program-program lokal yang bagus akan memperoleh peluang untuk meraih jumlah pemirsa yang lebih banyak dan memperoleh rating tinggi. Selain itu, program-program lokal yang bagus akan dapat dikembangkan menjadi program dokumenter untuk dipasarkan ke pasar internasional.

Hal ini akan menambah keyakinan bahwa program yang diproduksi tv lokal dapat berkompetisi di level yang lebih tinggi. Bagaimanapun harus diingat bahwa bisnis tv pada dasarnya adalah bisnis penuh resiko yang padat modal, padat tenaga kerja kreatif, dan padat teknologi.

Dalam kaitan dengan wilayah jangkauan dan wilayah layanan, tv lokal melalui siaran jaringan akan memperoleh manfaat yang besar tidak hanya dari aspek ekonomis, tetapi juga pengembangan budaya. Batasan wilayah layanan siar tv tidak semata-mata dipahami sebagai batasan wilayah geografis, tetapi juga budaya. Wilayah layanan tidak semata-mata dipahami sebagai batasan geografis,

tetapi juga mempertimbangkan jumlah penduduk, daya dukung ekonomi, dan juga kesamaan budaya.

TV berjaringan akan membuka peluang bagi tv lokal dalam meningkatkan kapasitas program dan pemasaran. Pola berjaringan ini bisa meraih jumlah penonton yang lebih luas dan melebihi radius jangkauan siaran. Dalam praktiknya tv berjaringan bisa berupa: 1) TV yang berjaringan dalam sistem telekomunikasi dan berafiliasi kepemilikan kepada pusatnya, seperti JTV dan jaringannya. 2) TV berbentuk *rap network* hanya berjaringan dalam pemasaran program. 3) TV yang berjaringan dalam sindikasi program yang dibuat bersama atau dibuat salah satu pihak seperti MNC. 4) TV yang berjaringan dalam semua aspek (produksi, pemasaran,dll)

Siaran jaringan sebagaimana kehendak regulasi penyiaran terasa berat dan sulit direalisasikan mengingat tv jakarta yang bersiaran nasional tidak punya kehendak untuk mengandengn tv lokal. Dalam kaitan ini maka logika pelaksanaan SSJ harus dibalik dengan mengedepankan inisiasi SSJ dari TV lokal. Dalam hal ini pada tahap awal TV lokal harus berjaringan dengan sesama tv lokal di dalam satu wilayah layanan dalam satu propinsi untuk menjadi tv jaringan regional.

Beberapa manfaat akan diperoleh melalui tv jaringan regional ini, yaitu: menghemat biaya produksi, memperluas jangkauan, dan menambah potensi pemasaran program. Sebagaimana diketahui selama ini pemasang iklan hanya mengenal wilayah lokal, regional, dan nasional. Iklan lokal selama ini tidak cocok untuk tv yang membutuhkan biaya operasional besar. Guna menopang produksi tv lokal, iklan yang efektif adalah iklan regional dan juga *public service announcement* (PSA). Kedua jenis iklan inilah yang efektif menopang pembiayaan iklan di tv lokal selama ini.

Sebagai gambaran wilayah layanan tv lokal di Jawa Timur dibagi ke dalam 8 wilayah layanan. Satu wilayah layanan meliputi 3-5 kabupaten. Di masing-masing wilayah layanan kanal yang tersedia untuk siaran rata-rata berjumlah 5-7 kanal. Kanal kalan tersebut selama ini sudah ditempati oleh tv eksisting dengan membangun stasiun relay.

Problematika kelangkaan kanal tersebut membuat pendirian tv lokal baru di Jawa Timur menghadapi kendala serius. Banyak pengajuan tv lokal di Jawa Timur yang tidak bisa lolos rekomendasi karena tiadanya ketersediaan kanal. Hal ini

membuat siaran tv id daerah didominasi oleh televisi jakarta yang bersiaran nasional (eksisting).

Sementara keberadaan tv lokal disisa-sisa kanal tersebut hanya memungkinkan 1 tv lokal bisa di dirikan dimasing-masing wilayah layanan. Hal itu pun masih dengan catatan menggunakan kanal co-channel atas diskresi Kominfo.

Potret tv lokal pada awalnya bisa tumbuh dengan baik. Hal ini karena ditopang oleh tekad, idealisme, dan semangat tinggi. Namun, seiring dengan persaingan mendapat iklan tv lokal mulai banyak yang menghadapi kendala pada pembiayaan operasional yang tidak sebanding dengan jumlah pemasukan. TV lokal kalah bersaing dan mendapat sisa-sisa dari iklan yang tayang di Tv nasional serta mendapat topangan iklan lokal yang jumlahnya tidak sebanding dengan biaya operasional produksi program tv lokal.

Atas fenomena ini maka tv lokal harus bisa bekerja sama dengan sesama tv lokal yang berada disatu propinsi dengan membentuk jaringan regional. Induk jaringan bisa diibu kota provinsi sebagai salah satu representasi satupun di level regional yang merupakan salah satu wilayah pertumbuhan guna mendekatkan diri dengan fungsi pemasaran.

Selanjutnya TV lokal di ibukota provinsi bertindak menjadi induk jaringan televisi lokal di wilayah satu provinsi. Melalui induk jaringan ini tv lokal bisa menawarkan diri program program di level nasional. Upaya memperbesar pemasaran ini pada akhirnya akan memberi dampak bagi pertumbuhan tv lokal didaerah. Siaran jaringan akan memberikan peluang lebih nyata kepada TV lokal dalam upaya meraih audien. Hal ini terkait dengan proximity, khalayak bisa lebih cerdas untuk memilih program acara yang sesuai kebutuhannya. Dengan demikian pada tahap awal akan ada model atau desain siaran berjaringan regional dalam satu Provinsi.

Sebagai gambaran siaran jaringan TV lokal Jawa Timur adalah sebagai berikut. Pada tahap awal tv lokal yang berada diibukota provinsi menjadi induk jaringan. Seperti Coverage area Arek TV akan dikembangkan dari Surabaya Raya (Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Bangkalan, Mojokerto, Pasuruan) menjadi Jawa Timur (38 kab/ko) dengan tetap mengindahkan aturan yang berlaku. Dalam siaran jaringan ini tv lokal akan mempertimbangkan kesamaan budaya. Mapping coverage area di Jawa Timur meliputi Budaya Arek, Madura Pandalungan, dan Mataraman.

Desain siaran berjaringan berbasis budaya tersebut dapat dilakukan dengan berjaringan dalam budaya yang sama seperti budaya arek yang meliputi Surabaya hingga Malang Raya.

Sementara budaya Madura & Pandalungan dapat discover oleh tv Madura dan yang berada wilayah pandalungan seperti Jember, Banyuwangi, Probolinggo. Budaya mataraman dapat dijaringan untuk tv local yang berada di wilayah bojonegoro, madiun, Kediri, Trenggalek dan Pacitan. Adapun pola jaringan dapat disesuaikan sesuai dengan standar yang disepakati bersama. Bagaimana teknis operasional marketing jaringan, pemilihan aspek teknik yang tepat, baik teknis penyiaran berjaringan mau-pun standarisasi peralatan di masing-masing stasiun jaringan dan ebutuhan human capital yang sesuai.

Penyesuaian Teknis Siaran Jaringan Regional

Guna melaksanakan siaran jaringan regional maka tv lokal harus melakukan penyesuaian meliputi aspek kelembagaan, program, dan teknologi. Ketiga aspek tersebut harus dikembangkan sesuai standar yang telah disepakati bersama antara induk jaringan dan anggota.

Dalam standar penyiaran tv lokal, beberapa yang harus diperhatikan antara lain 1) Aspek administrasi: harus profesional, akurat, dapat dipercaya, tepat waktu, tertib, dan rapi, 2) Aspek teknik: gambar dan suara dapat diterima secara jernih dan sempurna oleh audiens 3) Aspek SDM: pemimpin, karyawan dan pekerja adalah para profesional yang memegang teguh profesionalitas 4) Aspek audiens dan 5) Aspek riset: sebagai alat untuk mengukur audiens untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan mereka.

Hal penting dalam pelaksanaan siaran jaringan adalah perjanjian kerja sama antara stasiun induk dan stasiun anggota. Kesepakatan itu berisi antara lain: 1) penetapan stasiun induk dan anggota 2) program siaran yang direlay 3) persentase durasi relay siaran perhari, 4) persentase durasi siaran lokal perhari, 5) penentuan alokasi waktu (*time slot*) siaran lokal.

Kendala

Adapun kendala dalam pelaksanaan siaran jaringan kebanyakan disebabkan oleh biaya operasi pembuatan program yang mahal jika pilihan TV lokal tersebut tidak

berjaringan. Jika berjaringan sekalipun, seberapa besar induk jaringan tersebut memberikan acara berkualitas kepada anggota jaringannya. Kondisi hari ini bahkan induk jaringan menjual slot lokal mereka pada program *home shopping*. Secara bisnis mungkin mereka terbantu oleh *blocking time home shopping* tersebut, tapi secara kinerja program jangka panjang akan membuat persepsi buruk dari pengelolaan TV lokal. (Apni, 2012)

Regulasi dalam hal pengelolaan TV lokal atau berjaringan sangat menekankan pada prinsip *diversity in ownership dan diversity of content*. Pengelolaan TV lokal diarahkan pada pengelolaan tv lokal yang efisien dengan program lokal yang berkualitas dan *manageable cost*.

Menghadapi hal ini bisa dilakukan melalui kerja sama melalui sindikasi Produksi. Secara umum sindikasi dapat diartikan produksi dan penjualan bersama program televisi yang dilakukan oleh institusi produksi, induk jaringan dan anggota afiliasi jaringan. Pemanfaatan hasil sindikasi program utamanya (*first run*) adalah untuk anggota jaringan dan pada penayangan berikutnya bisa saja program tersebut di jual pada independent station lainnya. Sebab hanya dengan melakukan sindikasi produksilah mereka bisa mendapatkan program berkualitas dengan harga murah. Broadcast cost bisa dikelola dengan baik, dan harapan hidup stasiun lokal jauh lebih panjang.

Mengapa pilihan Sindikasi dilakukan, alasan berikut ini adalah pertimbangannya:

- Ketersediaan acara eksklusif hanya untuk anggota jaringan.
- Biaya program dan TV lokal yang besar jika ingin mendapatkan program yang berkualitas bisa dipangkas.
- Ketersediaan alat-alat produksi (studio equipment dan camera system yang terbatas
- Keterbatasan sumberdaya manusia di TV lokal
- Revenue bagian tv lokal bisa di atas pricing slot iklan local karena penjualan ditarik ke harga nasional

Tahapan penting dari sindikasi adalah kemampuan content providernya. Secara umum di ada 3 tahapan penting sindikasi yakni

1. Producers (PH) harus memiliki rencana produksi, pengembangan program dan fasilitas produksi
2. Semua konsep program sindikasi harus didelivery ke anggota jaringan yang akan diajak bekerjasama dan mendapatkan persetujuan anggota afiliasi
3. Marketing dan sales, baik local maupun nasional harus sudah melakukan strategipenjualan. Penjualan yang disarankan adalah penjualan dengan harga nasional.

Sementara itu dalam tahapan persiapan produksi, skema proses sindikasi adalah sebagai berikut

1. Ide program sudah disetujui oleh anggota sindikasi
2. Konsep program yang sudah diriset dan dikembangkan harus dibuatkan pilotnya
3. Sales departemen melakukan pre sales dengan strategi penjualan nasional
4. Tim Sales juga sudah melaporkan kemungkinan brand integration yang akan masuk ke program sindikasi
5. Pilot disetujui oleh anggota sindikasi dan dilanjutkan dengan produksi minimum satu musim
6. Sponsor juga sudah diajak melihat hasil produksi untuk memastikan kesesuaian yang diinginkan pihak sponsor.

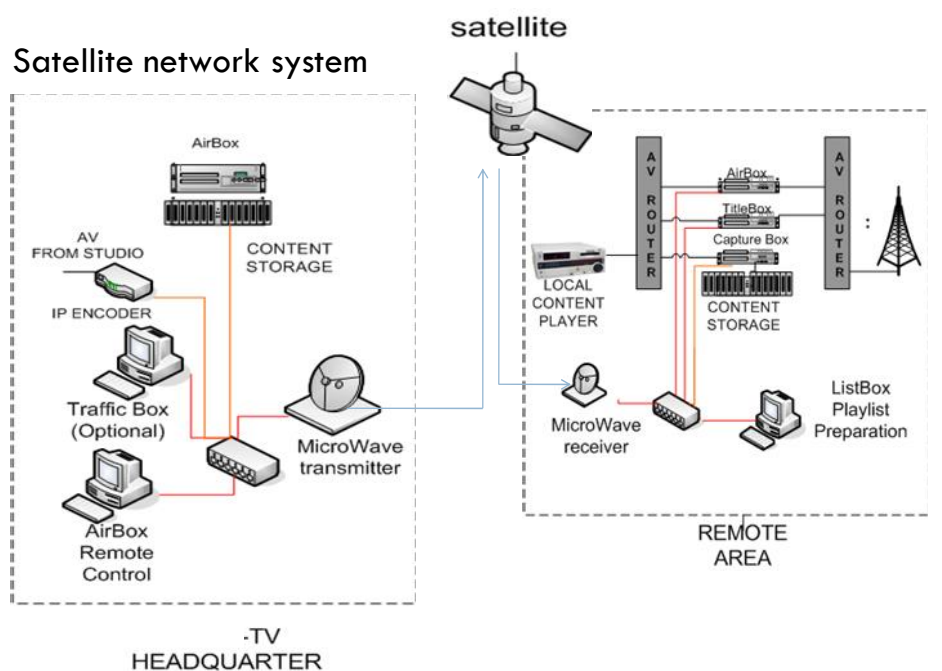
Implementasi Siaran Televisi Berjaringan

Terdapat beberapa kerangka implementasi dalam sistem siaran berjaringan. Namun, sejatinya terdiri atas dua sub sistem, yakni sistem stasiun induk jaringan dan sistem stasiun anggota jaringan. Induk jaringan merupakan pusat atau sumber program atau isi siaran yang akan didistribusikan kepada stasiun-stasiun lain sebagai anggota jaringannya. Sedangkan anggota jaringan merupakan stasiun televisi penerima isi program dari stasiun jaringan. Dalam praktiknya, stasiun anggota jaringan ini merupakan stasiun yang bersiaran dalam lingkup lokal dan berjumlah lebih dari satu.

Primsanti (2009) melalui penelusuran pustakanya mencatat bahwa Induk jaringan dan anggotanya memiliki hubungan dalam hal tertentu. Dalam mengkaji hubungan stasiun induk dan anggota jaringan, terdapat dua model hubungan,

yakni: *Program Affiliation Network* (jaringan afiliasi program) dan *Owned and Operated Station* (jaringan kepemilikan dan operasional).

Teknologi Siaran Jaringan dengan Sistem Satelit dan Terrestrial



Program Berbasis Budaya Lokal

Televisi lokal memiliki wilayah layanan *coverage area* yang terbatas sehingga daya dukung ekonomi juga terbatas. Keterbatasan ini harus dicarikan jalan keluar agar memiliki peluang untuk dapat dikembangkan menjadi Regional, Nasional, dan Internasional. Sejatinya wilayah layanan (*coverage area*) TV local berbasis budaya dan geografis. Sehubungan dengan itu, beberapa langkah strategis pun dilakukan. Salah satunya adalah dengan mengembangkan siaran lokal berjaringan. Agar siaran TV lokal dapat dinikmati masyarakat Jawa Timur sekaligus dapat menghidupkan dan memperkaya siaran tv lokal mitra.

Ciri Kultur Arek, gaya hidupnya metropolis, multi etnis, mobilitasnya tinggi, lugas dan egaliter. Kehidupan masyarakat di lingkup budaya Arek ini cenderung heterogen. Wilayah sebaran di kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Mojokerto, Jombang, Pasuruan, dan Malang. Surabaya menjadi pusat pemerintahan, pusat perdagangan, industri, dan pendidikan serta menjadi kota tujuan urbanisasi dari berbagai daerah di Jawa Timur. Kultur Arek akan dicover

oleh tv local wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Mojokerto, Pasuruan, Jombang, Malang Raya atau Batu.

Kultur Madura/Pandalungan

Mewakili budaya masyarakat pesisiran yang bercorak agamis, tradisional dan puritan. Adat istiadat dan bahasa sehari-hari biasanya menggunakan bahasa Madura. Sebagian besar masyarakatnya hidup dari pertanian, perkebunan, nelayan, perdagangan. Tokoh-tokoh agama Islam berperan penting sebagai “vote getter”. Wilayahnya: Madura, Probolinggo, Jember, Situbondo, Besuki, Bondowoso, Lumajang, Banyuwangi.

Kultur Mataraman

Mewakili budaya masyarakat pedalaman, dan terpengaruh oleh budaya kerajaan (Mataram) di Jogjakarta/Jawa Tengah. Adat istiadat dan bahasa sehari-hari menggunakan bahasa Jawa, halus, basa basi. Sebagian besar masyarakatnya hidup dari sektor pertanian, perdagangan, industri kecil. Sebaran Wilayahnya Tuban, Bojonegoro, Ngawi, Nganjuk, Madiun, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Blitar.

Dengan melihat kultur di atas maka program siaran jaringan dapat diklasifikasi dalam

- Program Siaran Regional Jatim.
- Program Siaran Berbasis Kultur Arek
- Program Siaran Berbasis Kultur Madura/Pandalungan
- Program Siaran Berbasis Kultur Mataraman
- Program Siaran Universal

Pola Jaringan

Set up lembaga penyiaran di area yang tidak ada stasiun TV yang masih memiliki alokasi kanal. Akuisisi : Pengambil alihan sebagian saham sesuai dengan peraturan perundangan Kemitraan : Kerjasama siaran dan marketing

Aspek Pelaksanaan Sistem Berjaringan

TV lokal di Surabaya Raya akan menjadi pusat kegiatan jaringan dan meliputi pola:

- Pola operasional Marketing jaringan
- Pemilihan aspek teknik yang tepat, baik teknis penyiaran berjaringan maupun standarisasi peralatan di masing-masing stasiun jaringan.
- Kebutuhan “human capital” yang sesuai.

TV lokal Area Daerah Maju dan Kurang Maju

Keberadaan televisi lokal di daerah kurang maju, khususnya kabupaten pinggiran di Jawa Timur belum memungkinkan untuk dapat membiayai penyiaran secara sehat. TV lokal yang berada di daerah kurang berkembang harus menjalin jejaring dengan tv lokal yang ada di daerah berkembang. TV lokal yang ada di daerah berkembang bertindak menjadi induk jaringan dan bekerja sama yang saling menguntungkan.

Keberadaan televisi lokal di daerah kabupaten rural menjadi kepanjangan bagi televisi yang berada di wilayah urban. Kerja sama antartelevisi akan dapat mempekuh keberadaan kedua belah pihak. Melalui kerja sama dan bagi hasil, keberadaan televisi lokal daerah akan berada pada posisi saling menguatkan.

Dinamika Politik Lokal

Televisi lokal berkembang seiring dengan era otonomi daerah, dimana masyarakat lokal mulai tumbuh dan berkembang atas inisiatif dan kemampuan mereka untuk mempercepat pembangunan. Televisi lokal diharapkan dapat menjadi salah satu faktor pendorong bagi difusi informasi kepada publik sehingga publik memiliki informasi yang cukup terkait dengan politik lokal.

Televisi lokal di Jawa timur juga telah berperan aktif didalam mendorong demokrasi politik dan keterbukaan informasi. Melalui berbagai program dialog dan liputan, televisi lokal mampu membuka ruang publik yang memungkinkan aktor dan publik lokal memiliki peran lebih besar dalam bidang politik.

Televisi lokal juga telah menjadi media partner bagi penyelenggara pemilu untuk mendukung kontestasi politik. Pendidikan politik melalui televisi lokal juga

telah terbukti mampu menciptakan ruang publik yang ideal, khususnya untuk relasi *state, market, dan civil society* dalam kontestasi politik. Televisi lokal juga telah mengambil peran untuk mendorong tumbuhnya perekonomian dan industri kreatif di daerah.

Perkembangan politik lokal tidak bisa dilepaskan dari peran aktif televisi lokal karena televisi lokal mampu membuka akses bagi partisipasi warga (citizen) untuk turut serta terlibat dalam pembangunan politik. Publik melalui televisi lokal mampu meningkatkan daya kritis dan kontrol atas proses politik sehingga pengawasan publik semakin meningkat dan berkualitas dari waktu ke waktu.

Keberadaan industri televisi swasta lokal di daerah harus terus dijaga dan ditingkatkan sehingga akses warga terhadap proses politik akan semakin baik dan berkembang. Program televisi lokal juga harus disupport agar media lokal dapat mendorong kualitas penyiaran yang pro publik.

Eksistensi TV Lokal

Televisi lokal di Indonesia mulai banyak berdiri sejak dibukanya kran demokrasi media hasil reformasi 1998. Reformasi itu salah satunya mendorong adanya deregulasi sektor media, khususnya menyangkut tata cara dan persyaratan perizinan mendirikan media baik cetak maupun elektronik. Adanya peluang mulai dibukanya perizinan media termasuk media penyiaran, membuat televisi lokal mulai bermunculan di berbagai daerah.

Berdirinya berbagai stasiun televisi lokal di Indonesia lebih banyak dipicu oleh motif bisnis untuk mendapatkan keuntungan (Hendarwan, 7: 2013). Hal ini bisa disimak dari proposal perizinan yang diajukan pada saat pengajuan proposal pendirian televisi lokal. Para pengusaha baik yang berlatar belakang pengusaha nasional maupun pengusaha lokal yang sebelumnya telah berkecimpung di dunia media seperti radio dan periklanan banyak yang mengajukan permohonan untuk perizinan media televisi swasta. Hal inilah yang membuat kompetisi untuk mendapatkan izin penyiaran semakin ketat, khususnya di daerah wilayah ekonomi maju. Bahkan, di beberapa wilayah dilakukan mekanisme *beauty contest* untuk menentukan pemenang yang mendapatkan jatah kanal terbatas tersebut.

Harus diakui pula dibalik motif bisnis yang memang menempel pada media penyiaran swasta, para pengusaha khususnya yang memiliki keterkaitan dengan wilayah sebagai putra daerah atau sebagai pengusaha yang dibesarkan di level daerah, inisiatif untuk mendirikan televisi lokal itu juga dibarengi idealisme tinggi. Hampir sebagian besar pengusaha memiliki bayangan yang indah dalam bisnis media penyiaran ini. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, pertumbuhan media yang tidak lagi terkontrol, penegakan hukum yang tidak tegas membuat media lokal yang baru tumbuh harus berhadapan dengan media eksisting termasuk yang dari Jakarta untuk bersaing head to head. Ibarat televisi lokal yang masih bayi dipaksa untuk berlari mengejar seniornya yang sudah bisa lari kencang. Akibatnya, televisi lokal banyak yang akhirnya tidak mampu bersaing dan kalah dalam meraih pemirsa dan juga iklan sebagai sumber pendanaan media penyiaran.

Kelas yang tidak sama antara televisi lokal yang bersiaran terbatas dengan televisi Jakarta yang bersiaran nasional membuat power tv nasional sangat berkuasa. Televisi lokal yang hanya bersiaran terbatas tidak mungkin bisa bersaing dengan tv nasional yang bersiaran luas. Hal inilah yang membuat peta persaingan ini sejatinya tidak fair. Televisi lokal dipaksa untuk langsung siap berhadapan dengan tv Jakarta nasional yang memiliki keunggulan pengalaman, fasilitas, pendanaan, juga pangsa pasar. Sementara habit penonton Indonesia sudah dimanjakan dengan fasilitas dan program siaran berbiaya tinggi dari tv Jakarta, membuat televisi lokal dipaksa untuk langsung memiliki kualitas yang kurang lebih sama. Akhirnya, idealisme tv lokal tersebut harus berhadapan dengan besarnya biaya pembuatan program yang tidak sebanding dengan pemasukan. Akhirnya, idealisme tersebut perlahan-lahan redup dan para pengelola tv lokal pelan-pelan menjadi realistis untuk kemudian pasrah kepada mekanisme pasar.

Kondisi dan kemampuan televisi lokal memang beragam. Ada beberapa tv lokal yang ditopang industri bisnis media yang sudah kuat membuat televisi lokal yang dikembangkan bisa tumbuh baik. Namun, televisi lokal yang tidak masuk dalam grup bisnis media dan menjadi core bisnis media pertama harus pantang panting untuk sekadar bisa bertahan asal bersiaran. Ditambah dengan lemahnya penegakan regulasi media penyiaran oleh penegak hukum membuat situasi

televisi lokal semakin merana dan berada dalam himpitan pasar. Tidak ada yang mencoba untuk menghadang untuk dikontrol demi kebaikan publik. Televisi lokal sengaja dibiarkan untuk hidup dan berkompetisi dalam situasi tanpa perlindungan dan pemihakan, demikian gambaran keberadaan televisi lokal pasca reformasi sejak 2002-2010.

Pertumbuhan televisi lokal dalam kerangka fundamentalisme pasar tersebut, membuat televisi lokal tidak lagi bisa lagi leluasa mengembangkan diri. Dari sini keberagaman kepemilikan dan keberagaman isi itu mulai menghadapi kendala. Mekanisme pasar membuat program lagi lagi tidak menjadi penting aspek kualitas, tetapi lebih merujuk kepada hasil rating yakni jumlah penonton. Ideologi pasar yang memberi keleluasaan kepada konsumen untuk memilih program membuat para programer cukup mendasarkan kepada rating dan program disesuaikan langsung dengan keinginan pemirsa. Akibatnya, terjadi homogenisasi program. Program di satu televisi yang terbukti mendapat jumlah penonton akan langsung diikuti oleh program serupa di televisi lain atau yang sering kita kenal sebagai strategi *me too program*.

Keberadaan pengusaha yang dicita-citakan bisa beragam agar isi media tidak mudah untuk dipolitisasi pemilik dalam praktiknya juga cukup sulit untuk ditegakkan. Hal ini diakui para komisioner KPI di daerah.

“Cukup sulit melarang kehadiran investor atau pengusaha Jakarta yang sudah memiliki bisnis media untuk tidak ikut menginvestasikan di media lokal. Malah banyak modus pengusaha lokal hanya sekadar sebagai perantara atau semacam broker sementara uang dan modal tetap berasal dari pengusaha Jakarta” (interview, Komisioner KPID Jawa Timur pada saat EDP April 2009)

Memang cukup sulit bagi regulator untuk membatasi kepemilikan dan hadirnya investor *loe lagi loe lagi* mengingat bentuk dan modusnya juga semakin canggih. Kadangkala pengusaha itu memakai nama pengusaha lokal sekadar untuk memuluskan perizinan, begitu izin selesai semua nama itu dikeluarkan dan diganti dengan nama investor yang sesungguhnya. Selain itu, modal media penyiaran juga tidak sedikit. Menurut penuturan pengelola JTV, untuk gedung, studio dan investasi alat serta produksi awal JTV telah mengalokasikan sebesar 70 Milyard rupiah. Sementara televisi lokal kelas dengan fasilitas terbatas minima

harus memiliki modal 3 miliar. Jika ingin bersiaran dengan jumlah power diatas 10.000 dibutuhkan modal hingga 10 miliar. Hal inilah yang membuat keberadaan pengusaha Jakarta sulit untuk dibendung dalam bisnis media lokal.

Program televisi lokal juga menghadapi tantangan yang tidak mudah. Hal ini karena selera penonton sudah terbiasa dan terbentuk melalui televisi Jakarta yang bersiaran nasional. Harus diakui bahwa selama ini siaran televisi didominasi oleh televisi Jakarta. Armando (2002) telah banyak mengulas mengenai hal ini baik dari sisi kepemilikan maupun keberagaman isi siaran. Jika menilik *historical situatedness*, pada awalnya televisi lokal swasta di Indonesia dimotivasi keinginan untuk melepaskan diri dari praktik sentralistik dan monopolistik di masa orde baru. Stasiun televisi lokal diharapkan menjadi alternatif untuk mengimbangi dominasi televisi swasta nasional yang berbasis di Jakarta. Keberadaan tv lokal sebagai jangkar pertahanan budaya lokal akhirnya tergesur oleh berbagai faktor kompetisi yang tidak fair. Akhirnya TV lokal pasrah menunggu nasib.

Kontribusi Teoritik

Perkembangan media dari otoritarian menjadi libertarian tidak langsung membawa dampak bagi munculnya demokratisasi media. Dalam era libertarian, pasar akan memberi pengaruh kuat dan memberi peluang bagi munculnya konsolidasi state. Dalam konteks televisi lokal para pengusaha dalam hal ini marker bekerja sama dengan elit pemerintahan lokal untuk menjalankan bisnis media lokal.

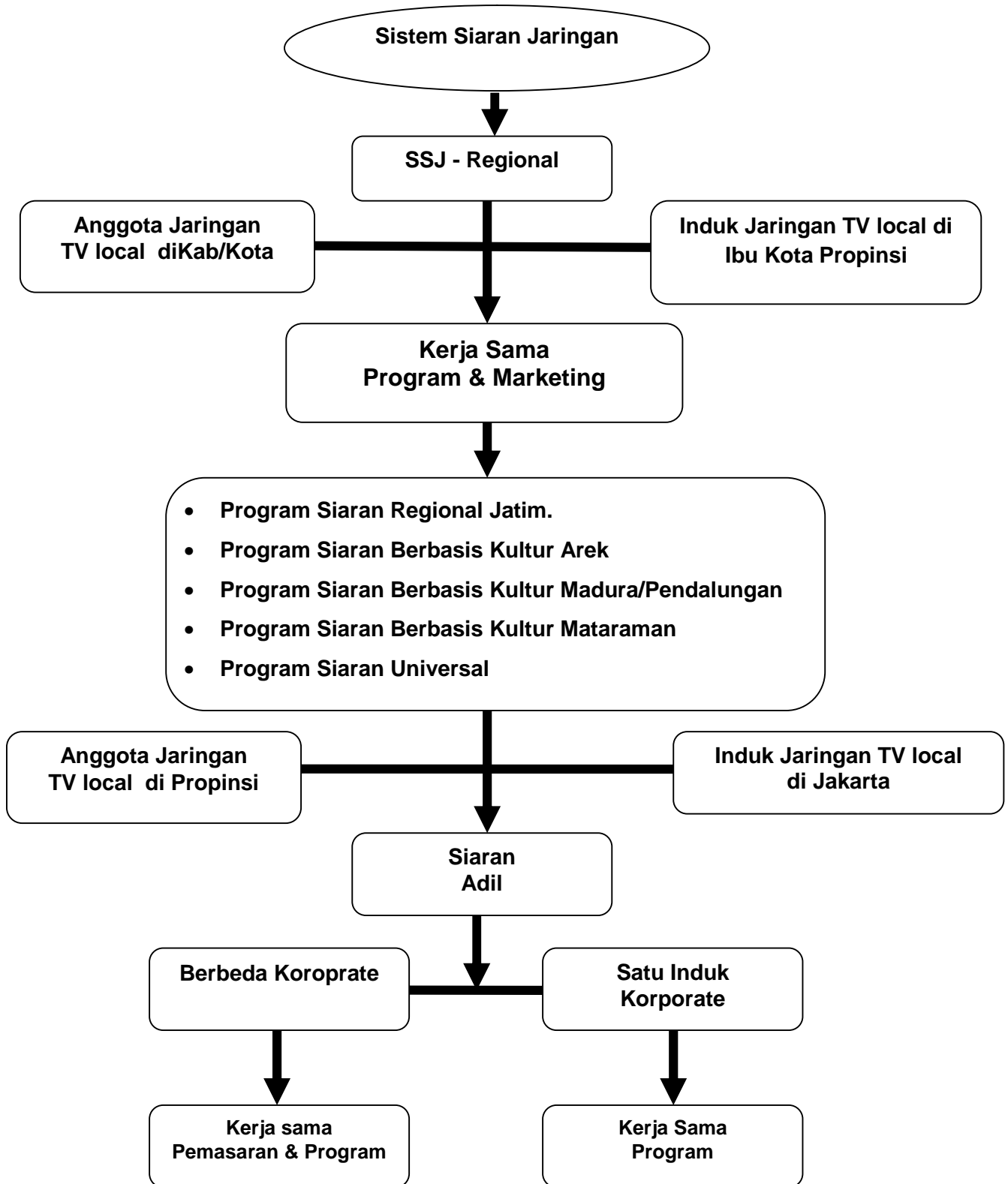
Idealisme pengelolaan televisi harus berhadapan dengan realitas pasar dan regulasi yang tidak bisa ditegakkan. Institusi media massa lokal tidak bisa hanya berbekal idealisme dalam pengelolaannya, tetapi menuntut komitmen dan dukungan yang kuat dari berbagai kalangan khususnya regulator untuk memberi perlindungan terhadap kepentingan publik

Dalam konteks fundamentalisme pasar cukup sulit untuk mengembangkan adanya keberagaman isi dan keberagaman pemilik, Program dan kepemilikan lebih banyak didorong oleh kepentingan bisnis daripada kepentingan sosial atau publik. Bahkan dalam beberapa hal terjadi pemusatan kepemilikan pada beberapa orang dan para pengusaha media lama.

Media televisi lokal dalam situasi seperti itu harus terus dicarikan solusi agar bisa mencipta ruang publik yang fungsional bagi demokratisasi media di daerah. Solusi itu diantaranya adalah melalui pengembangan sistem siaran berjaringan regional untuk memperkuat basis siaran dan pemasaran. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong keberagaman isi (*diversity of content*) dan keberagaman pemilik (*diversity of ownership*) yang menjadi inti dan roh demokrasi dibidang penyiaran.

Bagan 4

Desain Implementasi Siaran Jaringan TV lokal Regional



BAB VI

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

6.1 Seminar hasil dengan asosiasi perti komunikasi, asosiasi tv lokal dan tv nasional

Seminar hasil implementasi ini akan disampaikan dalam forum Asosiasi perguruan tinggi komunikasi dan membuka peluang kerjasama dengan tv lokal di wilayah layanan Jawa Timur, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI). Seminar Aspikom 2015 sudah dilaksanakan dan menunggu kesempatan untuk bisa bekerja sama dengan KPID Jawa Timur untuk membuka peluang bagi kerja sama antar tv lokal. Hal ini penting karena televisi lokal belum banyak yang melakukan penjangkauan dengan tv lokal, khususnya yang ada di provinsi untuk menjalin jejaring. Mereka akan dipaparkan model kerja sama regional ini untuk menambah daya saing bagi kedua belah pihak.

6.2 Partisipasi dalam Seminar Internasional

Peneliti juga akan berusaha mengikuti seminar internasional untuk mendesimenasikan hasil riset. *International conference* yang akan diikuti terkait bidang komunikasi dan penyiaran.

6.3 Evaluasi dan Perbaikan Desain

Tahap selanjutnya setelah proses implementasi ini adalah evaluasi model di JTV, Arek TV, dan TVRI TVRI Jatim dan Kompas TV. JTV dan Arek TV menjadi prioritas pengembangan siaran jaringan regional sementara TVRI dan Kompas TV sebagai pengembangan SSJ nasional.

Sebagai tahap lanjutan juga akan dilakukan diskusi dengan para ahli SSJ tv nasional dan KPI pusat regulator terkait sistem siaran jaringan di Indonesia. Catatan ini diperlukan sebagai bahan masukan atas desain yang disusun Selanjutnya dari perbaikan desain tersebut akan dievaluasi dan kembangkan lebih lanjut desain yang lebih komprehensif dan aplikable.

6.4 Pemantapan Desain

Setelah dilakukan ujicoba di beberapa TV lokal maka tahap selanjutnya adalah evaluasi model dan pemantapan desain secara berkelompok. Dengan fasilitasi KPID Jawa Timur, para pengelola TV lokal akan diundang untuk kembali memberikan masukan demi pemantapan model ini guna memberi masukan sekaligus *sharing* pengalaman terbaik (*best practice*) atas pelaksanaan SSJ di Jawa Timur. Forum ini sekaligus akan digunakan sebagai sosialisasi program kerja sama program antar wilayah layanan untuk memperluas wilayah layanan dan wilayah jangkauan siaran.

6.5 Penulisan buku Teks Ilmiah Populer

Hasil dari riset lanjutan ini juga akan ditulis dalam bentuk buku teks yang bisa dipakai sebagai bahan referensi kuliah. Buku teks ini juga akan mengadopsi format buku ilmiah populer sehingga bisa ditawarkan ke penerbit. Penulisan buku teks ini akan disusun dengan format ilmiah populer dengan mengadopsi prinsip desain buku komersial sehingga bisa diterima pasar khususnya sebagai buku referensi mutakhir.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

1. Desain sistem siaran jaringan tv lokal berbasis regional adalah tata kerja (kerjasama) antar lembaga penyiaran yang dikembangkan dengan berbasis wilayah provinsi. Wilayah layanan dan jangkauan siaran jaringan regional dikembangkan melalui kerja sama jaringan tv lokal yang meliputi beberapa wilayahan layanan kabupaten dalam satu provinsi.
2. Induk jaringan tv regional akan berada di ibukota provinsi dan melakukan kerja sama dengan tv jaringan diluar propinsi guna melakukan siaran jaringan nasional. Dengan demikian siaran berjaringan dilakukan secara bertingkat mulai dari siaran regional hingga siaran nasional.
3. Implementasi desain ini dapat berjalan dengan baik pada televisi lokal yang berada dalam satu induk perusahaan seperti JTV milik corporate Jawa Pos grup. Sementara tv lokal mandiri yang tidak tergabung dalam grup menghadapi masalah yang rumit menyangkut kejelasan kelembagaan, program siaran, dan penggunaan teknologi siaran, serta pembagian pendapatan.
4. Jika melihat daya dukung ekonomi sejatinya tv lokal berbasis kabupaten dan beberapa kabupaten hanya ideal dan ekonomis jika untuk bersiaran 4-6 jam selebihnya nilai ekonomis itu adalah siaran regional dan nasional. Dengan demikian jika televisi lokal swasta ingin berkembang sehat maka pilihan itu ada pada tv jaringan regional.
5. Program siaran yang dapat dikembangkan untuk kepentingan siaran berjaringan ini adalah mengembangkan program siaran berbasis budaya lokal, regional, dan nasional dengan bertumpu pada keunikan dan daya tarik. Program siaran berbasis budaya ini dikembangkan agar program tv lokal menjadi benteng pertahanan budaya lokal dan terlihat aspek proximity . Dalam konteks budaya Jawa Timur maka isi siaran dapat dikembangkan budaya ditingkat regional dengan mencermati budaya Jawa Timur.

6. Kelembagaan siaran berjaringan dapat disesuaikan dengan memperjelas sistem operasional dan bisnis. TV lokal tidak lagi menjadi stasiun independen murni, tetapi sebagai anggota afiliasi jaringan dengan memanfaatkan siaran yang ekonomis sesuai daya dukung dan potensi ekonomi setempat. Kelembagaan ini juga harus memperhitungkan soal kejelasan atas penggunaan aset investasi antar induk dan anggota. SDM juga harus diputuskan menjadi pegawai induk atau anak jaringan.
7. Teknis teknologi memegang peranan penting dalam siaran jaringan. TV lokal harus memiliki kapasitas untuk melakukan penyesuaian dengan standar tv induk mitra jaringan dengan demikian kapasitas teknologi sama dengan induk jaringan. Prinsip dasar adalah suport teknologi telah dikuasai tv lokal dengan standardisasi yang telah disepakati sehingga tidak terjadi gap antara kualitas program yang diproduksi anggota jaringan dan induk jaringan.

7.2 Saran

1. Sistem siaran jaringan regioanal harus tetap dilanjutkan guna mendorong desentralisasi penyiaran dan eksistensi tv lokal sesuai dengan daya dukung ekonomi setempat.
2. Kendati ada masalah dalam pelaksanaan khususnya pada tv lokal mandiri, tetapi peluang untuk melakukan penjajakan harus terus dilakukan guna mengefesienkan produksi dan nilai tambah sebagai tv regional.
3. Melakukan bimbingan teknis terkait dengan penerapan beberapa strategi dalam proses perencanaan dan produksi tv lokal dalam rangka SSJ regional. Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan potensi sumber daya yang dimiliki. Para produser dapat melakukan evaluasi atas program lokal mereka dengan menerapkan strategi baru sekaligus *sharing best practice* dengan pengelola tv lokal yang lain. Dalam hal ini para pengelola media dapat memiliki peta dasar (*roadmap*) dan rencana tindak lanjut pengembangan program secara berkelanjutan.
4. Melakukan penjajakan kerja sama atau sinergi program dengan tv nasional atau tv daerah lain dalam rangka memperluas wilayah layanan guna memperluas pasar. Kerja sama ini diperlukan dalam kaitan saling bertukar

program atau berbagi program sehingga *scheduling* program bisa semakin efisien dan efektif sesuai kemampuan dan daya dukung ekonomi.

5. Pengelola TV lokal mulai memperkuat divisi kreatif dan litbang sebagai basis pengembangan program dan terus melakukan perbaikan program secara berkelanjutan untuk mengantisipasi persaingan yang semakin ketat dan dalam rangka antisipasi masa depan melalui dukungan institusi, teknologi, dan regulasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Armando, Ade, 2011, **Televisi Jakarta di atas Indonesia: Kisah Kegagalan Sistem Televisi Berjaringan di Indonesia**, penerbit Bentang, Yogyakarta
- Black, James A. dan Dean J. Champion, 1999, **Metode dan Masalah Penelitian Sosial**, Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Creswell, John W. 1994. **Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches**. Sage Publication, London.
- Denzin, Norman K., and Yvonna S. Lincoln, 1994, **Handbook of Qualitative Research**, Thousand Oaks, London.
- Hamad, Ibu, (2006) **Riset Aksi: Mencetak Agen Perubahan**, dalam Jurnal Thesis Vol V/No. 2 Mei-Agustus 2006, Jakarta
- Lindlof, Thomas R., 1995, **Qualitative Communication Research Methods**, Thousand Oaks, London.
- Masduki, 2007. **Regulasi Penyiaran, Dari Otoriter ke Liberal**, Yogyakarta: LkiS
- McQuail, Dennis. 1992. **Media Performance: Mass Communication and the Public interest**, London: Sage Publications.
- Moleong, Lexy J., 1999, **Metode Penelitian Kualitatif**, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Mosco, Vincent. 1996. **The Political Economy of Communication: Rethinking and Renewal**, London: Sage
- Neuman, William Lawrence, 2000, **Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches**, Allyn & Bacon, USA.
- Sudibyo, Agus. 2004. **Ekonomi Politik Media Penyiaran**, Yogyakarta: LKiS
- Patton, Michael Quinn. 2002. **Qualitative Research & Evaluation Methods**, 3th Sage Publications, London.
- Wahid, Wardi. 2005. **TV Lokal : Mampukah Mereka Bersaing?** dalam [<http://tvconsulto.com>] diakses 7 Mei 2011
- Wibowo, Wahyu, dkk, 2013, **Kedaulatan Frekuensi: Regulasi Penyiaran, Peran KPI, dan Konvergensi Media**, Penerbit Kompas, Jakarta

Jurnal :

- Primasanti, K.B (2009), **Studi Eksplorasi Sistem Siaran Televisi Berjaringan Di Indonesia**, Jurnal Ilmiah SCRIPTURA, Vol. 3, No. 1, Januari 2009: 85 - 102
- Sudarmawan, Wahyu, **Peluang dan Tantangan Bisnis Televisi Lokal Pasca Regulasi Televisi Berjaringan**, Jurnal Komunikasi, UII Vo. 2, No. 1 Oktober, 2007

Dokumen :

- UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Makalah

Arek TV goes to Jatim
Kajian Program Arek TV
Model Sindikasi Kompas TV Jawa Timur

LAMPIRAN

- Artikel ilmiah untuk diseminarkan
- Buku Teks Sistem Siaran Jaringan Regional (*draf*)

EKSISTENSI TELEVISI LOKAL & PENGEMBANGAN STASIUN JARINGAN REGIONAL

Pusat Kajian Komunikasi Publik (Puskakom) UTM
Program Studi Ilmu Komunikasi FISIB
Universitas Trunojoyo Madura



Surokim, S.Sos, SH., M.Si
Muhtar Wahyudi, S.Sos, MA
DR. Catur Suratnoaji, M.Si

EKSISTENSI **TELEVISI LOKAL**

Pengembangan Stasiun Jaringan Regional

Surokim, S.Sos, SH, M.Si
Muhtar Wahyudi, S.Sos, MA
DR. Catur Suratnoaj, M.Si



Pusat Kajian Komunikasi Publik (Puskakom) UTM

**REALIZING REGIONAL NETWORK BROADCASTING SYSTEM
TO ENCOURAGE A MORE EQUITABLE COMPETITIVENESS
OF LOCAL PROGRAM AND LOCAL BROADCASTING TV
IN INDONESIA**

**Surokim
Muhtar Wahyudi
Catur Suratnoaji**

- *1 and 2: Lecturers and Researchers at the center for public communication studies, faculty of social and cultural science, Trunojoyo University, Madura Indonesia. Email: surochiem@gmail.com*
- *3: Lecturer of Communication Departement, Faculty of Social And Political Science at UPN Veteran, Surabaya, East Java, Indonesia*

Abstract

This research found a new design for local TV in application of network broadcasting system (SSJ) which is appropriate with the condition, need and special characteristics of local broadcasting in Indonesia. This research also obtained a deep understanding of how the application and experience of local TV applied the cooperation of broadcasting system which is appropriate with the condition and potention to increase the ability to compete in this industry. The purpose of this research was to gain the design of network broadcasting that can be applied directly on East Java local TV. This network broadcasting design was inisiation of local TV and will be applied in a multilevel, they are cooperate broadcasting and marketing in regional level and cooperate broadcasting in national level. Local TV that operate dan service in limited area will have network with local TV at the same province for regional broadcast. Furthermore, main of regional local TV will cooperate with TV in another provinces for national broadcast. By this, there are 3 levels of coverage dan service area, they are local TV, regional TV, and national TV. Main obstacle in implementation of this system is how complicated the regulation is and the TV wishes who has been in national broadcasting to cooperate with. Broadcasting program will be also strenghtened with categorization of culture-based programs in accordance with the broadcast need beginning from the local, regional, and national level. By this new design, then local TV will get benefit and more values, they are expanding the reach of coverage area, enlarge audience share, and also enlarge opportunities in marketing program. Thus, network broadcasting system design must be revised and repaired until it can be implemented in a multilevel that appropriate with the economic power support and the regional progress degree. This networking initiative is emerge from the local independent TV as efforts to increase coverage area and service area.

Keywords: Network broadcasting system, Local TV, Local TV program, East Java Indonesia

Background of the research

This research applied on local TV in East Java Province service dan coverage area. The sum of local TV in this service area is note down as the most in Indonesia, there are 37 stations. The conditions of local TV in this area are various and the existence are unique enough. There are local TV who able to grow fast then it can compete with national TV, but there are also local TV who difficult to develop and just be able to survive to keep broadcasting minimally.

Condition of local TV in East Java beside facing competition with national TV, but also compete with another fellow local TV at the same service area. However, serious problems faced by local TV in East Java is the striking different in class between Jakarta TV (existing) and local TV. National TV has excellence in service area and coverage area which is wider then it can grab a share of a bigger national advertising market. While local TV only able to scavenges the residues of national TV advertisement.

While local bureau that should be changed to be local station, precisely change to virtual. Realization of network system actually turned out to be understood in the context of broadcast with local content only. It is like what has done by SCTV Surabaya bureau in realizing local broadcasting of East Java which in full broadcast from Jakarta. SCTV bureau that will be pushed to be local station exactly changed to virtual. All news production process were done in Jakarta, and SCTV region being a contributor only. There is no production activities in East Java local station. Even, marketing process and other off air activities were done from Jakarta. Local bureau that should be pushed to be local station just be a fantasy. If this trend is followed by Jakarta TV, so SSJ just getting away from the reality. Content of local broadcasting just being a shield to cover duty of an hour broadcast only, and it has no direct contribution for broadcasting progress and regional economic.

The five years research (2007-20011) showed that there was no clear *roadmap* related to development of local TV in this country. Local TV program such as trapped in euphoria of broadcasting politics so the ability to build local TV is unfollowed by preparation of program, institutional, business, and technical established. The result of researcher analysis related with the performance of local TV broadcasters in East Java showed that there were three aspects, they are institution problems, programs, and technical.

This data is the more affirming that actually East Java local TV is facing difficult and complicated situation. East Java local TV not only have to face competitors as the same local TV, but also have to face national TV who excellent in coverage and modality.

By literary investigation, the researcher saw experiences (best practice), comparition, many countries experiences further more to get values related with the condition in our country, and then being adopted with and doing model adaptation to aplicate in Indonesia.

This research will product network broadcasting design that then can be aplicated especially in East Java and generally in Indonesia. Hopefully by the existence of the design, this network broadcasting system will be realize soon and there will be a clear *roadmap* in its implementation and development in the future.

By this design, hopefully local TV and national TV can be developed together and support each other and also gain benefit in mutual. Through partnership with local TV, national TV is expected to perform impressively to be a networking local TV which is proximately with local beholder. By having partnership with local TV, national TV will get wider coverage in each service area which is in work on, and then can increase the competitiveness. Moreover, *sharing* partnership technique with local TV partner in several areas was proven that it may help quality of Jakarta TV broadcast that at first can not be maximal to get better in being received by local society. The application of this network broadcasting will also strengthen national association and unity through diversity of broadcast content and ownership.

As effort to complete the study about network broadcasting and to get comprehensive study on network broadcasting system in Indonesia, so a further studies about network broadcasting system with special constructive method is needed. It is also to complete illustration of network broadcasting system through the broadcasting performers' vision in region or center in studying other issues around this network broadcasting system.

This research is important to do, consider to the instruction of law broadcasting 32/2002 that pushed broadcasting media as anchor and the holder of national association and unity. This research is strategic also for local TV in doing their duty to decentralize broadcasting so it can grow in safe and professional then it may cooperate with national TV.

Development of network broadcasting for region will bring a big benefit, beside get close to the broadcasting itself, it also will bring economic effect for the region. Creative industries such as *production house* of local people are unable to develop in many areas then it will give enough economic effect and chance for labor addition. This research is strategic enough as a part of placing local TV industry as the host in each area.

This research will give contribution in application of network broadcasting system in Indonesia which since today still can not be implemented yet and in a position of tug's interests that also can not be finished yet. In Indonesia, network broadcasting system is a choice that had been formulated in law number 32/ 2002 about broadcasting. This network broadcasting system appreciates as a better way in the theme of democratization of broadcasting.

REVIEW OF RELATED LITERATURE

Democratization of Broadcasting

Democratization of broadcasting is a public claim, especially in communicating as a public good, and also the recognition of sovereignty public on public domain. Frequency spectrum which is used for broadcasting must be arrange as big as possible for people's prosperity. Concept of broadcasting democratization covers: (1) independent, (2) plurality of ownership and institution's orientation with its content and (3) decentralisation or decontration of broadcasting from Jakarta to regions.

The democratization of broadcasting in Indonesia covers: (1) independent of human resources (human recources and broadcasting institution), (2) plurality of ownership, management and orientation of broadcasting content and (3) decentralisation and autonomy broadcasting. While, broadcasting democratization focus on two principal pillars, they are: (1) democratization as assurance where there will be no

intervention for content and discussion in broadcasting media in any form, (2) openness for participation of all parties in equivalent and independent.

There are several factors which determines broadcasting democratization, they are: (1) the ideology of economic-politics (choice of vision-mision and philosophy), (2) external side (advertisement, government, and community), (3) management of media station (owner and regular decision), (4) the power of critical-democratic (academician, non-goverenment organizations, community organization, etc), and (5) broadcasters (broadcaster, reporter, editor)

The change of broadcasting such as: (1) mutation of broadcasting orientation, from medium of country interest articulation to medium of market dynamics actualization, (2) mutation of ownership substance, from private-state-non-profit to community-public-profit, (3) mutation of broadcasting content, from entertainment (music) to jurnalism, (4) mutation of broadcasting package, from monologue-reactive to interactive dialogue, and (5) mutation of technology, from analog era to digital era.

Regulation strategy is a combination of two flows of broadcastig democratization movement, they are naturally model (given to market mechanism) by Abraran and organized model (through roleplay) by James Curran. Choice of organized strategy is through regulation that arranged together with broadcasting country that the effect is generic and the formulation is susceptible to corruption, collusion and nepotism. By those, choice to make law that arrange broadcasting climate (law No. 32/2002) is the best choise among the worst in broadcasting law no. 32/2002 on the enactment of decentralization principle. It means that commercial television must stop thw kind of national broadcasting and must having collaboration with local television.

Social responsibility theory.

Law no. 32/2002 about broadcasting trully has opened the chance for the grow of local broadcasting media in several regions that in its turns is having positive effect for development's dynamics of a region. This fundamental regulation is opened for regional community to built broadcasting institution which is appropriate with the local character, custom, culture and norms.

When it is viewed by each theory, actually Indonesian broadcasting regulation is not submitting the pure market liberalism, but get closer to social responsibility theory. This theory emerge the concept of *diversity of content* and *diversity of ownership* which in several things are giving covers for local potency and ownership delimitation. One of the implementation is in the form of networking between national TV and local TV. In that broadcastig form, actually there will be no head to head between Jakarta TV which is in national broadcasting and local TV which is in limited broadcasting.

This regulation also gives space for people to participate in broadcasting sector and being the subject , host in their own territory. The existence of local broadcasting media is so useful too for region goverenment in the context of development in the sector of social, politics, or culture.

The affirmation of local content in national broadcasting is also purposed as bastion of national culture defense as the consequence of globalisation influence. By this, local culture power in media is also being a bet. Globalisation in such context actually not always products homogenous global culture. Nowadays, in global level is also being colored by demand of local content (a cultural quota) and being a part of business strategy of International media corporation (Rahayu in Siregar, 2010). They also

understand if local community has capacity to join negotiation, even to refuse those global products. An addition of local content in the scheme of global business media is truly as a part of expansion strategy by local media market.

Locality is believed to be a market expansion's power because of the relations and sentimental culture. It is believed to push, determine and manage local market *sense of belonging* and *sense of identity*. Beside it, study of culture media also reminds that media products who pass the country lines or culture will be received or responded by specific ways (locally specific way) (Lee, Rahayu, in Siregar 2010).

The flow of broadcasting as what has embraced in broadcasting law no. 32/2002 is a social responsibility, which is actually as a middle way between libertarian and ototarian. In those flows, then TV industries must be responsible also to consider utility function for public. TV media beside executes mandate to entertain also has moral responsibility to educate and doing social control.

Broadcasting System of Networking Television.

Primasanti (2009) cited Head and Streling (1987) define network broadcasting system as "... two or more stations interconnected by some means of relay (wire, cable, terrestrial microwaves, satelittes". While Hiebert, Ungurait, Bohn (1974: 265) emphasized to organisational aspect by explaining that network broadcasting is a program organizing, marketing, technical and administration from several stations by a network station.

While Siregar (2001: 27) said that network broadcasting system is an existence of a main station with several local stations that being peripherals in broadcasting. Relationship between main station and local station is the full ownership or stocktaking and relating with feeding program. Network broadcasting generally define as a broadcast feeding system in central to a number of broadcasting station (Siregar, 2001: 10)

Primasanti (2009) refered to the result of Putra's research report (1992) which had summarized that "Networking television is a group of local televisions, connected together, electronically, then program can be suplied through single source that can be broadcasted all at once". While Indonesia, by giving accentuating to partnership concept, law no. 32/2002 about broadcasting deals with network broadcasting as partnership between local broadcasting station with national broadcasting station. In national broadcasting system, there are broadcasting institution and network pattern which is equitable and integrated, that are developed by making network station and local station.

By this, network broadcasting generally can be seen as broadcasting system that consists of two sub systems, they are main broadcasting station and member of networking who has certain relation. Furthermore, the existence of network broadcasting system should be related with influenced factors and crucial aspects that forming a system.

Broadcasting system of networking television in Indonesia trully is a national-local network broadcasting system, considering that network broadcasting system oftentimes is meant differently.

Development of broadcasting system is usually affected by geography, demography, linguistics, economics, culture and political pressure aspects in a country or from neighboring countries. Moreover, Browne said that there is none complete, perfect, and enough broadcasting system to call ideal (Brown, 1989: 3). Different ways in applicating elements of broadcasting system makes one broadcasting system is different with others (Summers, Summers and Pennybacker, 1978:19)

As a broadcast system in general, in a broadcasting system of networking television there are aspects that determines character of system which is applied. To know those crucial aspects, it is needed to read Summers's paradigm, Summers and Pennybacker and Browne. Summers, Summers and Pennybacker (1978: 19) as cited by Primasanti (2009) suggested two crucial aspects. First, related with control mechanism, through three categories:

1. *State ownership*: broadcasting facility is owned directly by government with broadcasting activities under supervision of government or committee who had been chosen by government.
2. *Autonomous corporation*: broadcasting facility is owned and operated by corporation which is even owned by government but almost all are independent from government's power.
3. *Private ownership*, broadcasting facility is owned and operated by private corporation, usually arrange in several ways by government corporation.

Secondly, is financial planning aspects (Summers, Summers and Pennybacker, 1978: 19). In broadcasting system in general, this financial planning is also consists of three categories:

1. *Tax support*: the way of funding especially through tax.
2. *Licence support*: primarily is supported by permission payment which is payed every year by the owner of radio or television's equipments.
3. *Advertiser support*: primarily is supported by advertising sale for business and service significant that hopefully can distribute the order to a large number of people.

Brown (1989: 17-59) also explains crucial aspects in broadcasting institution, they are: financing, supervision, control and influence, communication policy, broadcaster audience interaction, and programming. Elaborating Summers, Summers and Pennybacker's and Brown's thought, can be concluded that there are several aspects composing network broadcasting system, they are; financing, control mechanism and supervision; and programming. These several aspects will be realized in specific characters appropriate with purposes that had been imagined by network broadcasting system which is being applied. By this, the aspects who able to form the network broadcasting system is the aspects suitable to support the aim of network broadcasting system which is applied.

RESEARCH METHOD

This research uses constructivism paradigm. This paradigm emphasize on how people as broadcaster interpret their daily reality (socially meaningful action). Researcher has a duty to make a note and describe broadcaster's daily experiences in facing fact of life society, where in this case is their experiences and thinking constructions in operating broadcasting.

Research method that is used is descriptive. This research method is not seeking or explaining the relationship, not testing hypotheses or make a prediction, but explaining situation or event. Descriptive method focus on observation and naturalistic setting. Researcher as the viewer. He make behaviour categories, observing the symptoms and note it down to observation book. There are several data collection techniques, they are: 1) Observation, it is by identifying cultural values which is grown in people's daily life. The kind of observation is participant observation, it means that the researcher is directly

involved in the monitoring of the cultural values in people's naturalistic setting and performance of broadcasting institution in East Java. 2) Indepth interview by using some questions that had been suited with the conceptual framework to the chosen informant. 3) FGD (Focus Group Discussion)

The sampling technique that is used is purposive sampling. The main consideration is knowledge and experience capacity in managing local TV to be the basic in arranging network broadcasting design. Data analysis will be done together with data collection, data interpretation, and narrative reports writing. In qualitative analysis, some activities will be done together by the researcher, such as collecting informations from the field, sorting informations to a groups, formatting information to a description or draft, and writing qualitative document (Creswell, 1994: 47, summarized by Bogdan & Biklen, 1992). Researcher do the proof to make sure the internal validity, by doing data and source triangulation strategy. The data will be collected by compound source, it is by indepth interview, observation and document analysis. The analysis instruments which are used are responsibility theory, political economics media, media democracy and network broadcasting. The location of this research is East Java which has 37 local broadcasting stations. The TV station that is going to be researched are TV stations in area where the East Java cultures are described, represent the geographical typical characteristics, and the economic power support. This is to gain the comprehensive description related with local TV performance and regional local TV East Java patterns.

DISCUSSION

Local TV network broadcasting design in base service area.

Network broadcasting system actually is a transformation from centralistic broadcasting system to decentralisation broadcasting. This system is able to realize the economic mapping and also to increase new employment in some areas such as housing production and advertisement in regional. Network broadcasting is a solution for limitations of coverage area and service area which is faced by local TV in regional. By network broadcasting, local TV manager can increase the audience share and enlarge marketing program. A good local programs will gain chances to get more audiences and get a high rating. In addition to that, a good local programs will be developed to be documentary program to be marketed in international market.

It is going to add a conviction that program produced by local TV can compete in a higher level. However, it must to be remembered that TV bussiness basicly is full of risk such as capital intensive, solid of creative labor and solid of technology.

Related with coverage area and service area, local TV through network broadcasting will gain a big benefit not only from economic aspects but also in developing culture. Limitation of TV service area is not only being understandable as limitation in geographic area, but also about the culture, considering the sum of population, economical power support and also the similarity of culture.

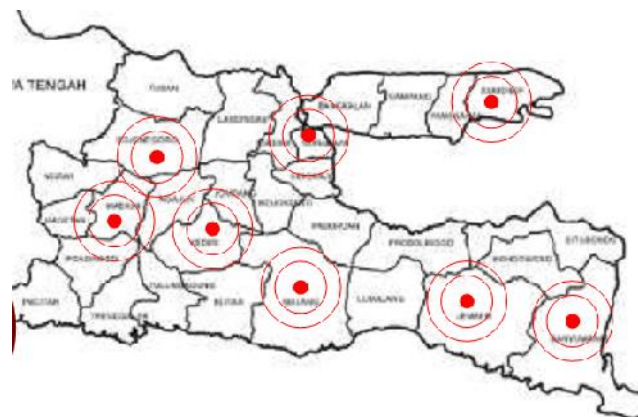
Network TV will open opportunities for local TV in increasing capacity of program and advertising. This networking pattern can get larger audience and exceed radius of coverage area. In practice, networking TV can be: 1) networking TV in telecommunications system and affiliated ownership to the center, such as JTV and its networking, 2) TV in a kind of rap network only have networking in marketing program, 3) networking TV in syndication program that built together or by one party, such as MNC, 4) networking TV in whole aspects (production, marketing, etc)

Network broadcasting as the will of broadcasting regulation is too hard and difficult to realize consider to Jakarta TV which is in national broadcasting have no will to cooperate with local TV. In this regard, then logic implementation SSJ should be reversed by put forward SSJ inisiation from local TV. In this case, the first step is local TV must networking with the fellow local TV at one service area in a province to be regional networking TV.

Some benefits will be get by this regional networking TV, they are: save on the cost of production, enlarge the coverage and increase potention of marketing program. As it known during this, advertisor only knew local, regional, and national areas. Local advertisement during this is not suitable with TV who need a big operating cost. To shore up local TV production, the effective advertisement is regional advertisement and also public service announcement (PSA). Both of this advertisements are effective to shore up the cost of local TV during this.

As illustration of local TV service area in East Java, it is devided into 8 service areas. A service area covers 3-5 regencies. There are about 5-7 channels for each service area. Those channels are being occupied by existing TV through building relay station.

For more details can be seen by this picture.



Picture 1 East Java local TV broadcasting's map.



Picture 2 East Java local TV channel's map.

Problems in the channel's scarcity made the conviction of new local TV in East Java confront a serious obstacle. Many tenders of local TV in East Java can not qualify the recommendations because there were no channel. It made regional TV broadcasting being dominated by Jakarta television which is in national broadcasting (existing).

While the existense of local TV in those residues channels just allowed 1 local TV to be built in each service area. Even it is still in note only by using co-channel by discretion of KOMINFO.

The snapshot of local TV at the beginning is growing well. Because it is shored up by the strong will, idealism, and high spirit. But, along with the competition to get advertisements, local TV get more obstacles in operational funding which is unworthy with the income. Local TV are defeated to compete and only get residues of national TV advertisements and support from local advertisements which is the number is unworthy with the operational production cost of local TV program.

By this phenomenon, then local TV must be able to cooperate with fellow local TV in a province by making a regional network. Main network can be at the capital province as one of representation of station in regional level which is as one of growth area for get closer to marketing function.

Furthermore, local TV in capital province act as main network of local television in a province. By this main network, local TV can offer their programs to national level. Eforts to enlarge this marketing finally will give effect for the development of regional local TV. Network broadcasting will give more real chance for local TV to get more audiences. It is related with the proximity, people can be smarter to choose the program they need. By this, at the first phase there will be a regional network broadcasting model or design in a province.

As illustration, East Java local TV network broadcasting are as follows. At the first step, local TV in capital province being a main network. Just like coverage area, Arek TV will be developed from Surabaya Raya (Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Bangkalan, Mojokerto, Pasuruan) to be East Java (38 regency/town) but still attend to the rules. In this network broadcasting, local TV will consider the similarity of cultures. Mapping coverage area in East Java includes Budaya Arek, Madura Pandalungan and Mataraman. Those culture map can be seen on the picture below.



Picture 3 East Java culture's map

Network broadcasting design in culturary basis can be done by networking in the same culture, such as Arek's culture covers Surabaya to Malang Raya.

While Madurese and Pendalungan's culture can be covered by Madura TV and others in Pendalungan areas, such as Jember, Banyuangi and Probolinggo. Mataraman culture can be in network for local TV in Bojonegoro, Madiun, Kediri, Trenggalek and Pacitan. Networking pattern can be adapted with a mutually agreed standardization. How the operational of tehncial marketing network, election of the exact technical aspects, even in technical network broadcasting or standardization of equipments in each network stations and appropriate human capital need.

Adaptation of technical regional network broadcasting.

In order to implement regional network broadcasting TV, then local TV must do adaptation through institution, program and technology aspects. Those three aspects must be developed based on the mutually agreed standardization between main network and the members.

In the local TV broadcasting standard, there are some things to watch out for, they are: 1) administration aspects: must be professional, accurate, can be trusted, on time, orderly and neat, 2) technical aspects: picture and sound can be accepted in clear and perfect by the audiences, 3) human resources aspects: employees and workers are the profesionalis who hold the profesionalities, 4) audiences aspects, and 5) determination of local broadcasting's time slot.

Obstacles

Many of obstacles in network broadcasting's implementation are caused by an expensive cost of production program if the local Tv choice is not networking. Even if in networking, it is about how big the main networking give a qualified program to their members is. Even the condition today is the main network sell the local slot to *home shopping* program. In business, maybe they are helped by the *blocking time home shopping* itself, but in long-term program performance it will make a bad perception from local TV management (Apni, 2012)

Regulation in local TV management or networking is focus on the *diversity in ownership and diversity of content*. Management of local TV is directed to efficiently local TV management by qualified local TV program and *manageable cost*.

Confronting this can be done by cooperate with production syndicate. Generally, syndicate means production and sale together of television program by production

institution, main networking, and the member of network affiliation. Utilization of the prior program syndication's result (first run) is for the network members and for the next presentation, the program could be sold to other independent stations. Because only by doing production syndicate they can get a cheap qualified program. The broadcast cost can be managed well, and the life expectancy of local station is much longer.

Why this Syndication is done, here are some considerations: 1) availability exclusive program only for network members, 2) cost of program and local TV which are big can be reduced if the qualified program are wanted, 3) availability of production equipments (limited studio equipment and camera system), 4) limitedness of human resources in local TV, 5) revenue of local TV can be on pricing slot local advertisement because the sales are token in national cost.

The important phase of syndicate is the ability of the content providers. Generally, there are 3 important phases in syndications, they are: 1) producers (PH) must have production plan, developing program and production facilities, 2) all syndication program concept must be delivered to network members who will get cooperate and take affiliation members agreement, 3) marketing and sales, local or nationals must have done the selling strategies. Marketing that is suggested is marketing in national cost.

While in production's preparation phase, the scheme of syndication process are: 1) the program's idea has been agreed by the syndication members, 2) program concept that had been researched and developed should be made the pilot, 3) departement sales do the pre sales by national sales strategy, 4) sales tim also have reported the possibillies of itegration brand that will come into syndication program, 5) the pilot is agreed by syndication members minimal in a season, 6) sponsor also had been invited to see theproduction result to make sure the suitability that is wanted by the sponsor itself.

Implementation of network broadcasting television.

There are several implementation framework in network broadcasting system. But actually consist of two sub system, they are main network station system and member network station system. Main network is the center or source of program or the content of broadcasting that will be distributed to other stations as the member of the network. While member network is television station as the receiver of content program from network station. In the practice, this member network station is a station who broadcasting in local and the number is more than one.

Primasanti (2009) through her book investigation noted that main network and the members have relationship in several things. In studying the relationship between main station and network members, there are two models of relationship, they are: *Program Affiliation Network* and *Owned and Operated Station*.

Program in base of local culture.

Local television has limited coverage area then economical power support is limited too. This limitation must look for the solution in order to have chance to develop to be Regional, National and International. Actually the coverage area of local TV based on culture and geography. Related with it, several strategy steps are done. One of them is by developing local network broadcasting. It is to make local TV broadcastig are enjoyed by people in East Java, all at once to revive and enrich local TV broadcasting partner.

Characteristics of Arek culture are metropolis lifestyle, multi-ethnic, high mobility, direct and egalitarian. People's life in this Arek culture is heterogeneous. The spreading

areas are in Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Mojokerto, Jombang, Pasuruan and Malang. Surabaya being the center of government, grade, industry, and education, also being urbanization destination city from many of regions in East Java. Arek culture will be covered by local TV in Surabaya, Gresik, Lamongan, Mojokerto, Pasuruan, Jombang, Malang Raya or Batu areas.

Madura culture/Pandalungan

Representing the culture of coastal community as religious, traditional and puritans. Custom and daily languages usually use are madurese. Almost all the people are live from the agriculture, plantantion, fisherman and trade. Islaic figures have important role as “vote getter”. The areas are: Madura, Probolinggo, Jember, Situbondo, Besuki, Bondowoso, Lumajang and Banyuwangi.

Mataraman culture.

Representing community of inland’s culture and being influenced by kingdom’s culture (Mataram) in Jogjakarta/Central Java. Custom and daily languages usually use are javanese, soft, chit chat. Almost all the people are live from agriculture, trade and little industries. The areas are: Tuban. Bojonegoro, Ngawi, Nganjuk, Madiun, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kediri and Blitar. By those culture above, then network broadcasting program can be clasified in 1) East Java regional broadcasting program, 2) broadcasting program based on Arek culture, 3) broadcasting proram based on Madura/Pendalungan culture, 4) broadcasting program based on Mataraman culture, and 5) universal broadcasting program.

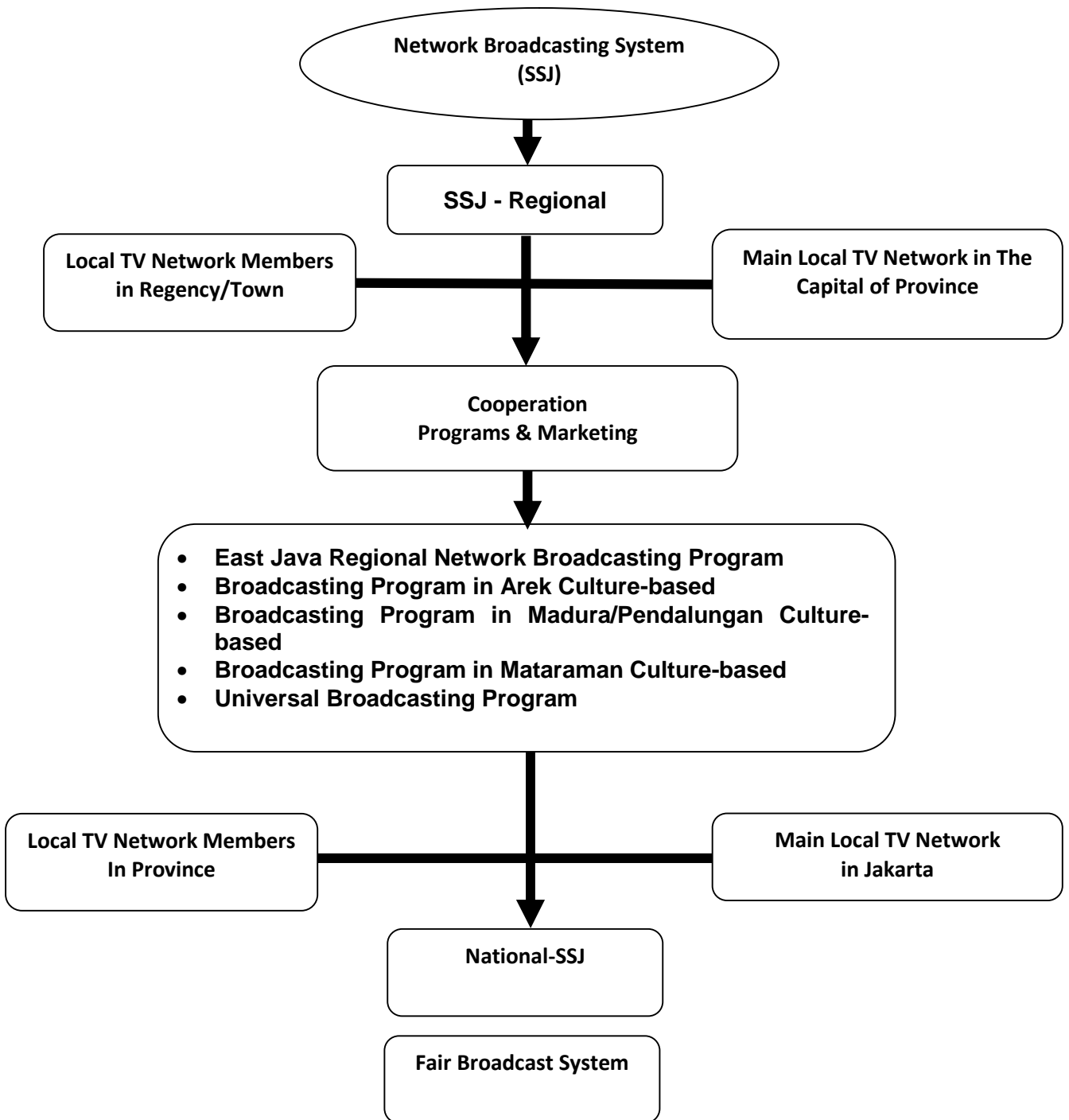
Networking pattern are set up by broadcasting institution in area where there is no TV station who still have channel alocation. Acquisition: the takeover of a part of stock in accordance with legislation partnership. Partnership: broadcasting cooperation and marketing.

Implementation aspects of broadcasting system.

Local TV in Surabaya will be the center of networking activities who covers patterns: 1) the operational pattern of network marketing, 2) selection of appropriate technical aspects, either in network broadcasting technic or standardization of equipment in each network station and 3) appropriate “human capital” need.

Picture 4

Frame of Regional Local TV Network Broadcasting Design.



Conclusion and Suggestion

Conclusion

Local TV network broadcasting system design is cooperation between broadcasting institution who are developed by considering service area and coverage area. SSJ service area is developed through cooperation of local TV networking in a province then being a regional network broadcasting. Main regional TV network will cooperate with TV in other provinces to be national network broadcasting. By this, SSJ is done in multilevel, beginning from regional broadcasting to national broadcasting.

Broadcasting program that can be developed for the importance of this network broadcasting is a development of culture-based broadcasting program which is appropriate with networking need, even in local, regional and national level by focus on the uniqueness and appeals. This culture-based broadcasting program is developed to make local TV program being a bastion of local culture and the proximity aspect can be seen. In the context of East Java culture, then the content of broadcasting can develop cultures in regional level by paying close attention to East Java culture.

The institutional of network broadcasting can be suited by clarifying operational system and business. Local TV is not being a pure independent station anymore, but being a member of network affiliation by utilizing economical broadcasting suited with power support and local economy potentials. This institutional also must count the clarity of investment assets use between main and the members. Human resources also must be chosen as main employee or sub-network.

Technological technic hold an important role in network broadcasting. Local TV must have capacity to adapt with main TV network partner standard then the capacity of technology will be the same as main network. The basic principle is technological support that has been controlled by local TV with the agreed standardization so there will be no gap between the program quality produced by network members and by main network.

To ensure the existence of local TV and network, then local TV must be able to develop responsive management system appropriate with development of surroundings, even in local, regional, national or global level.

Special thanks

The writers convey appreciation and thank to DP2M Ditjen Dikti who have given donation for this research through cooperate college research year 2014 that being the basis of writing this journal articles. The writer also say thanks to the East Java local TV organizer, especially for JTV management, Arek TV and Kompas TV who gave the study of network broadcasting in increasing capacity of local TV management. The last, the writer also say thanks to LPPM Trunojoyo University of Madura, Indonesia.

REFERENCES

Books :

- Armando, Ade, 2011, **Televisi Jakarta di atas Indonesia: Kisah Kegagalan Sistem Televisi Berjaringan di Indonesia**, penerbit Bentang, Yogyakarta
- Black, James A. dan Dean J. Champion, 1999, **Metode dan Masalah Penelitian Sosial**, Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Creswell, John W. 1994. **Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches**. Sage Publication, London.
- Denzin, Norman K., and Yvonna S. Lincoln, 1994, **Handbook of Qualitative Research**, Thousand Oaks, London.
- Lindlof, Thomas R., 1995, **Qualitative Communication Research Methods**, Thousand Oaks, London.
- Masduki, 2007. **Regulasi Penyiaran, Dari Otoriter ke Liberal**, Yogyakarta: LKiS
- McQuail, Dennis. 1992. **Media Performance: Mass Communication and the Public interest**, London: Sage Publications.
- Moleong, Lexy J., 1999, **Metode Penelitian Kualitatif**, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Mosco, Vincent. 1996. **The Political Economy of Communication: Rethinking and Renewal**, London: Sage
- Neuman, William Lawrence, 2000, **Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches**, Allyn & Bacon, USA.
- Sudiby, Agus. 2004. **Ekonomi Politik Media Penyiaran**, Yogyakarta: LKiS
- Patton, Michael Quinn. 2002. **Qualitative Research & Evaluation Methods**, 3th Sage Publications, London.
- Wahid, Wardi. 2005. **TV Lokal : Mampukah Mereka Bersaing?** dalam [<http://tvconsulto.com>] diakses 7 Mei 2011
- Wibowo, Wahyu, dkk, 2013, **Kedaulatan Frekuensi: Regulasi Penyiaran, Peran KPI, dan Konvergensi Media**, Penerbit Kompas, Jakarta

Journals :

- Primasanti, K.B (2009), **Studi Eksplorasi Sistem Siaran Televisi Berjaringan Di Indonesia**, Jurnal Ilmiah SCRIPTURA, Vol. 3, No. 1, Januari 2009: 85 - 102
- Sudarmawan, Wahyu, **Peluang dan Tantangan Bisnis Televisi Lokal Pasca Regulasi Televisi Berjaringan**, Jurnal Komunikasi, UII Vo. 2, No. 1 Oktober, 2007

Documents:

- UU No. 32 Tahun 2002 about broadcasting

Working Papers:

- Anonimous, Arek TV goes to Jatim
Kajian Program Arek TV
Model Sindikasi Kompas TV Jawa Timur
Putra, Apni Jaya, 2012, *Model Perbandingan TV Network di AS, Jepang dan Indonesia*, Kompas TV Jakarta

Skema Penelitian:
PENELITIAN KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI (PEKERTI)

Judul:
**REDESAIN SISTEM DAN PROGRAM SIARAN
BERJARINGAN TV LOKAL SEBAGAI BASIS
PENGUATAN MEDIA PERFORMANCE TV LOKAL
DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF DI
DAERAH
(STUDI PADA TV LOKAL & JARINGAN JAWA TIMUR)**

Peneliti:
Surokim, S.Sos, M.Si (Peneliti Utama) NIDN 0022067404
Muhtar Wahyudi, S.Sos, M.A (Anggota) NIDN 0001067408

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA



DESKRIPSI

Riset ini menemukan desain baru atas inisiatif TV lokal dalam pelaksanaan siaran berjaringan (SSJ) yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kekhasan penyiaran lokal di Indonesia. Riset ini juga mendalami bagaimana penerapan dan pengalaman tv lokal dalam menerapkan sistem kerja sama siaran yang cocok sesuai dengan kondisi dan potensi guna meningkatkan daya saing. Secara khusus riset ini bertujuan untuk menghasilkan desain siaran berjaringan yang bisa diterapkan langsung di TV lokal Jawa Timur.

Desain siaran berjaringan ini merupakan inisiasi tv lokal dan dilakukan secara bertingkat yakni siaran kerjasama dan marketing di tingkat regional dan kerja sama siaran di tingkat nasional. TV lokal yang beroperasi di area terbatas terbatas akan berjaringan dengan tv lokal di wilayah provinsi yang sama untuk bersiaran regional. Selanjutnya induk tv lokal regional akan bekerja sama dengan tv diprovinsi lain untuk bersiaran nasional. Dengan demikian ada 3 level coverage area yakni tv lokal, tv regional, dan tv nasional. Pola Jaringan dilakukan melalui: Kemitraan yaitu Kerjasama siaran dan marketing. Program siaran juga akan dikuatkan dengan strategi membuat kategorisasi program berbasis budaya sesuai dengan kebutuhan siaran mulai dari tingkat lokal, regional, dan nasional.

Dengan desain baru ini maka tv lokal akan memperoleh manfaat dan nilai tambah diantaranya memperluas jangkauan wilayah siaran (coverage area), memperbesar jangkauan pemirsa (audience share), dan memperbesar peluang pemasaran program.

Desain sistem siaran berjaringan dapat dilaksanakan secara bertingkat sesuai daya dukung ekonomi dan tingkat kemajuan daerah. Inisiatif berjaringan ini muncul dari tv lokal independen sebagai upaya untuk meningkatkan wilayah jangkauan (coverage) dan wilayah layanan (service area)

Riset didanai:
DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Tahun 2014

**REDESAIN SISTEM DAN PROGRAM SIARAN BERJARINGAN
TV LOKAL SEBAGAI BASIS PENGUATAN
MEDIA PERFORMANCE TV LOKAL
DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF DI DAERAH
(STUDI PADA TV LOKAL & JARINGAN JAWA TIMUR)**

